

336.22
SIT
f e1

**FAKTOR - FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TESIS

*Diajukan kepada Pengelola Program Studi Magister Manajemen
Universitas Diponegoro
Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana - S2 Magister Manajemen*



Diajukan oleh :

**Anton Sitanggang
NIM C4A 098 114**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2001**

Surat Pernyataan Keaslian Tesis

Saya, Anton Sitanggang, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri yang belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar pada program magister manajemen ini ataupun pada program lainnya. Karya ini adalah milik saya, karena itu pertanggungjawabannya sepenuhnya berada dipundak saya.

Anton Sitanggang

Maret 2001

PENGESAHAN TESIS

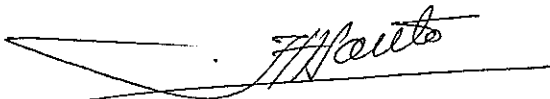
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis berjudul:

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

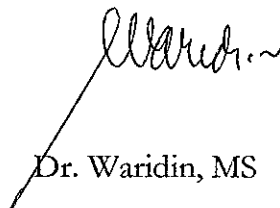
Yang disusun oleh Anton Sitanggang, NIM C4A098114
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Februari 2001
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota



Drs. L. Suryanto, MM



Dr. Waridin, MS

Semarang 2001
Universitas Diponegoro
Program Pasca Sarjana
Program Studi Magister Manajemen
Program



Prof. Dr. Suyudi Mangunwihardjo

MOTTO

Kesungguhan mengerjakan sesuatu merupakan modal utama
untuk meraih sukses

Kupersembahkan kepada:

- Ayahanda dan Ibunda terkasih (dalam kenangan).
- Zelvia Saulina isteri tercinta
- Berliana, Yudith, Rosmeinar, Nadonda dan Gabriela puteri-puteri tersayang
- Ayah Mertua (dalam kenangan) dan Ibunda mertua terkasih.

ABSTRACT

Putting the Law No. 22 of the year 1999 into effect meant that each region would enter the new era of the Structuring of the Governmental and Economy Systems. The Regional Governments demanded to dig income sources constantly, which one of their expense sources was through the Land and Building Tax acceptance. The contribution percentage of Land and Building Tax acceptance against Special District of Yogyakarta's Regional Budget had always decreased since the last five periods of budgeting year, 1999/2000, whereas its nominal amount of Land and Building Tax acceptance decrease was 2.323 billion rupiahs in 1999/2000. Factors affecting the Land and Building Tax acceptance were necessary to be analyzed

The secondary data was utilized in this research, collected by using the documentation technique. Analysis method employed was multiple linear regression, which the classical test towards the autocorrelation and multicollinearity symptoms would prior be executed. Hypothesis test performed with 5 % significance level and one tail test. Subsequent data that could not be explicated quantitatively would be carried out with the descriptive analysis.

This research result shows that the amounts of dunning letters, tax payers, the infrastructure development and income funds per capita as a whole or partially affects significantly against the Land and Building Tax acceptance in Specific District of Yogyakarta. The amounts of dunning letters, tax payers and the infrastructure funds as well as Gross Regional Income per capita affect mostly in Yogyakarta town and Sleman regency. Whereas in Gunungkidul regency, four factors studied have the lowest influence. The Regional Government is therefore necessary to launch the intensification program by much more digging the tax potency, performing extension continuously, enhancing tax service quality, executing cross-check among tax inspection offices and taking action the law enforcement. The Government should re-examine the Law No. 12 of the year 1994 regarding there were changes of community life-styles appropriate to the era development. The development infrastructure funds are necessary carried out effectively and integrated as to be able enhancing obviously the land and building values besides elevating the conducive climate for the investments and economic movements, so that the Gross Regional Income can be increased.

ABSTRAKSI

Pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 berarti setiap daerah akan memasuki era baru dalam Penataan Sistem Pemerintahan dan Sistem Perekonomian. Pemerintah Daerah dituntut untuk terus menggali sumber pendapatan, salah satu sumber pembiayaannya adalah melalui penerimaan PBB. Pada D.I. Yogyakarta sejak lima periode tahun anggaran terakhir persentase kontribusi penerimaan PBB terhadap APBD D.I. Yogyakarta selalu mengalami penurunan dan secara nominal penerimaan PBB pada tahun 1999/2000 mengalami penurunan sebesar 2,323 milyar rupiah. Oleh karena itu perlu dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB

Pada penelitian ini digunakan data sekunder, yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan terlebih dulu akan dilakukan uji klasik terhadap gejala autokorelasi dan multikolinearitas. Uji Hipotesis dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% dan uji satu sisi (*one-tail*). Selanjutnya data yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif akan dilakukan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana dan pendapatan per Kapita secara keseluruhan maupun secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di D.I. Yogyakarta. Jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita terutama berpengaruh paling besar di Kodia Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul, keempat faktor yang diteliti mempunyai pengaruh yang paling rendah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu melakukan program intensifikasi dalam lebih menggali potensi pajak, terus menerus mengadakan penyuluhan, meningkatkan mutu pelayanan pajak, melakukan *cross check* antar inspeksi pajak, dan menegakan *law enforcement*. Pemerintah seyogyanya mengkaji ulang UU No. 12 tahun 1994 mengingat terdapat perubahan-perubahan perkehidupan di masyarakat selaras dengan perkembangan jaman. Dana prasarana pembangunan perlu dilaksanakan secara efektif dan terpadu untuk benar-benar dapat meningkatkan nilai bumi dan bangunan selain meningkatkan iklim yang kondusif bagi investasi dan pergerakan ekonominya, sehingga dapat meningkatkan PDRB.

UPT-PUSTAKA-DNDIP

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan Puji Tuhan atas rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan judul :”Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh derajat Sarjana S-2 Magister Manajemen, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis yakin bahwa Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari pihak yang telah bersusah payah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. L. Suryanto, MM selaku dosen pembimbing kesatu yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan pada penulis sehingga terwujudnya Tesis ini.
2. Bapak Dr. Waridin, MS selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan pada penulis sehingga terwujudnya Tesis ini.
3. Bapak Dr. Imam Ghozali, M.Com.Akt yang telah memberikan dorongan untuk tetap melanjutkan studi di MM Undip hingga sampai terselesaikannya tesis ini.
4. Bapak Abdul Hasyim, SH selaku Kepala Kantor PBB berserta staff, Kepala Kantor dan Staf BPS D.I. Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian serta memberikan data yang sangat penulis butuhkan.

5. Ketua Pengelola Program Magister Manajemen Universitas Diponegoro beserta staf dan para dosen yang telah banyak memberikan bantuan menambah pengetahuan penulis.
6. Istri saya tercinta Zelvia, dan dan puteri-puteriku yang tersayang yang telah banyak memberikan dukungannya.
7. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu disini.

Namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna.

Sebagai akhir kata, harapan penulis dalam penyusun Tesis ini dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semarang, Maret 2001

Penulis

Anton Sitanggang

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORI	10
2.1. Pengertian Pajak	10
2.2. Pajak Bumi dan Bangunan	12
2.3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB	18
2.4. Kerangka Pikir	28
2.5. Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis dan Metode Pengumpulan Data	31
3.2. Definisi Operasional	32
3.3. Metode Analisis	33

	Halaman
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	36
4.1. Keadaan Daerah Penelitian	36
4.1.1. Letak dan Luas Daerah	36
4.1.2. Jumlah dan Mata Pencaharian Penduduk	38
4.1.3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	39
4.2. Hasil Pembangunan yang di Capai	40
4.2.1. Prasarana Sosial	40
4.2.2. Pertanian	42
4.2.3. Industri	43
4.2.4. Perdagangan	44
4.2.5. Perhubungan	44
4.2.6. Keuangan	46
4.3. Sistem Pemungutan PBB	47
4.4. Deskripsi Data Penelitian	50
4.4.1. Jumlah Penagihan	50
4.4.2. Jumlah Wajib Pajak	53
4.4.3. Dana Prasarana Pembangunan	56
4.4.4. Pendapatan per Kapita	59
4.4.5. Penerimaan PBB	62
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	65
5.1. Persamaan Regresi	65
5.1.1. Propinsi D.I. Yogyakarta	65
5.1.2. Kodia Yogyakarta	66
5.1.3. Kabupaten Kulonprogo	66
5.1.4. Kabupaten Bantul	67
5.1.5. Kabupaten Gunungkidul	68
5.1.6. Kabupaten Sleman	68

	Halaman
5.2. Pengujian Secara Statistik	69
5.2.1. Propinsi D.I. Yogyakarta	69
5.2.2. Kodia Yogyakarta	78
5.2.3. Kabupaten Kulonprogo	85
5.2.4. Kabupaten Bantul	92
5.2.5. Kabupaten Gunungkidul	100
5.2.6. Kabupaten Sleman	107
5.3. Analisis Variabel – variabel yang Mempengaruhi Penerimaan PBB di D.I. Yogyakarta	114
5.3.1. Jumlah Surat Penagihan	114
5.3.2. Jumlah Wajib Pajak	117
5.3.3. Dana Pembangunan Prasarana	121
5.3.4. PDRB per Kapita	124
5.4. Implementasi Strategi	126
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	 131
6.1. Kesimpulan	131
6.2. Saran – saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Proporsi Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) Terhadap APBD Propinsi D.I. Yogyakarta tahun 1994/1995 – 1999/2000 (dalam juta rupiah)..	6
Tabel 4.1 : Jumlah Kecamatan dan Kelurahan dengan Luas Daerah di D.I. Yogyakarta Tahun 1999	37
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk di D.I. Yogyakarta Tahun 1999	38
Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di D.I. Yogyakarta Tahun 1999	40
Tabel 4.4 : Jumlah Surat Penagihan PBB di D.I. Yogyakarta Tahun 1988/1989 - 1999/2000	51
Tabel 4.5 : Jumlah Wajib Pajak di D.I. Yogyakarta Tahun 1988/1989 - 1999/2000	54
Tabel 4.6 : Dana Pembangunan Prasarana di D.I. Yogyakarta Tahun 1988/1989-1999/2000	57
Tabel 4.7 : PDRB per Kapita di D.I. Yogyakarta Tahun 1988/1989-1999/2000	60
Tabel 4.8 : Jumlah Penerimaan PBB di D.I. Yogyakarta Tahun 1988/1989 - 1999/2000	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998
- Lampiran 2 : Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE – 55/Pj.6/1998
- Lampiran 3 : Petunjuk Pembuatan Keputusan Menteri Keuangan

- Lampiran 4 : Data Sumber Excel
- Lampiran 5A : Data Sumber SPSS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 5B : Data Output SPSS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Regression
- Lampiran 6A : Data Sumber SPSS Kodia Yogyakarta
- Lampiran 6B : Data Output SPSS Kodia Yogyakarta Regression
- Lampiran 7A : Data Sumber SPSS Kabupaten Kulonprogo Regression
- Lampiran 7B : Data Output SPSS Kabupaten Kulonprogo Regression
- Lampiran 8A : Data Sumber SPSS Kabupaten Bantul Regression
- Lampiran 8B : Data Output SPSS Kabupaten Bantul Regression
- Lampiran 9A : Data Sumber SPSS Kabupaten Gunungkidul Regression
- Lampiran 9B : Data Output SPSS Kabupaten Gunungkidul Regression
- Lampiran 10A : Data Sumber SPSS Kabupaten Sleman Regression
- Lampiran 10B : Data Output SPSS Kabupaten Sleman Regression

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang sedang dilaksanakan di negara Indonesia dewasa ini meliputi pembangunan segala aspek kehidupan yang pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut, sebagaimana di negara yang sedang berkembang (*developing countries*) lainnya, mengalami pasang surut dalam pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu pembangunan harus diselenggarakan secara berkelanjutan, dan terencana dalam segala bidang.

Pembangunan adalah upaya memanfaatkan segala potensi yang ada di masing-masing daerah. Oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Ghofir, 2000). Hal ini mencerminkan berlakunya otonomi daerah. Otonomi daerah mulai dilaksanakan pada tahun 2001, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan pemberlakuan Undang – undang tersebut, setiap daerah akan memasuki era baru dalam Penataan Sistem Pemerintahan dan Sistem Perekonomian.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Setiap daerah dituntut bersaing secara positif dalam kegiatan perekonomian jika tidak ingin ketinggalan oleh daerah lain, karena otonomi daerah bukan lantas berarti menutup diri dari daerah lain. Sebaliknya, setiap daerah dapat melakukan inovasi untuk akses langsung ke luar negeri untuk memperoleh devisa bagi daerahnya. Prasetyo Aji (2000) berpendapat bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada publik dan melaksanakan program pembangunan. Dana pembangunan itulah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya.

Bagi Pemerintah Daerah pembiayaan pembangunan di wilayahnya berasal dari Sumber Pendapatan Daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan dari Pemerintah Pusat, baik yang berupa Bagi Hasil, Sumbangan maupun Ganjaran. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk terus menggali sumber pendapatan di wilayahnya dalam rangka mendapatkan dana untuk melaksanakan pembangunan. Pemerintah Daerah dalam upaya mobilisasi dana pembangunan daerah tersebut melakukan peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) yang terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal tersebut akan dilaksanakan secara serius antara lain dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan daerah (misalnya lewat kegiatan pariwisata) ataupun menjaring wajib pajak baru di wilayah tersebut disamping mengefektifkan cara-cara penarikan PBB.

Berdasarkan data statistik APBN 1998/1999 dapat diketahui bahwa pada pos penerimaan dalam negeri, pertumbuhan penerimaan pajak selama Repelita V rata-rata sebesar 25,38% dan selama Repelita VI rata-rata sebesar 20,07%. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa dari berbagai macam sumber penerimaan, pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan. Sedemikian pentingnya peranan pajak sehingga GBHN telah mengisyaratkan bahwa pembiayaan dari sektor perpajakan merupakan sumber yang stabil dan sangat potensial serta sesuai dengan semangat pembangunan dan rasa keadilan. Dalam rangka kemandirian ini, sebagian besar kegiatan pembangunan di sektor Dalam Negeri dibiayai oleh sumber-sumber penerimaan dalam negeri yaitu pajak, yang tidak rentan terhadap gejolak pasar dunia serta mempunyai basis dan struktur yang kuat (Prasetyo Aji, 2000).

Winangun (2000) menyatakan bahwa Indonesia harus menyiapkan diri lebih dini karena cepat atau lambat harus menerima keberadaan dari globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional agar dapat mengikuti kecenderungan tersebut dan mengambil kesempatan yang akan timbul dari perubahan ekonomi internasional. Di antara faktor penting yang menentukan keberhasilan dalam meraih peluang di era globalisasi adalah adanya perangkat pendukung ekonomi yang baik, efektif, dan efisien antara lain di bidang perpajakan.

Terlebih lagi pada krisis ekonomi saat ini, fungsi dan peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan semakin penting dan strategis terutama pada saat kondisi ekonomi nasional yang masih mencari pemecahan /jalan keluar dari krisis ekonomi dan moneter yang pemulihannya masih butuh waktu serta kebijakan

ekonomi mikro dan makro secara menyeluruh (Purnomo, 2000). Prasetyo Aji (2000) menyatakan bahwa rasio penerimaan pajak pada tahun 2000 baru 11%-12% dari Produk Domestik Bruto (PDB), padahal jumlah penduduk Indonesia yang berada pada kondisi ekonomi yang mapan dan mampu membayar kewajiban pajaknya proporsinya cukup besar. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan besar yang menjadi obyek pajak sering lolos dari jaring perpajakan karena beberapa hal, baik dari segi wajib pajak maupun segi aparatnya.

Ghofir (2000) mengungkapkan bahwa sebelum penerapan otonomi, diperlukan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi oleh daerah tersebut. Syarat tersebut adalah kesiapan sumberdaya alam dan manusia yang dipunyai. Syarat tersebut seyogyanya telah dipersiapkan jauh sebelum otonomi diterapkan. Kondisi ini diperlukan demi kesinambungan pembangunan agar setelah diterapkannya otonomi daerah kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Adapun alternatif pembiayaan pembangunan yang dapat ditempuh, yakni dengan pemberdayaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Daerah.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari sub sektor pajak, terutama adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Seluruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akan diserahkan kembali kepada pemerintah Daerah sebesar 90% yang terdiri dari 9% upah pungut, 16,2% untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan 64,8% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan yang 10% sebagai penerimaan Pemerintah Pusat (Direktorat Jendral Pajak, 1997). Perkembangan penerimaan PBB dapat

dikatakan cukup tinggi, namun demikian hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut bila dalam kondisi yang baik akan membawa pengaruh yang mendukung peningkatan penerimaan PBB, tetapi apabila dalam kondisi yang tidak baik maka akan menghambat peningkatan penerimaan PBB.

Oleh karena itu guna meningkatkan penerimaan PBB perlu menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB, sehingga dengan mengetahui hal tersebut dapat disusun strategi yang tepat agar peningkatan penerimaan PBB dapat dicapai dengan efektif. Dalam kaitan tersebut, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan penggalan potensi di daerahnya melalui pengkajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaannya sehingga kemandirian dalam melaksanakan otonomi daerah dapat semakin nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Salah satu Pemerintahan Daerah yang saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan adalah Daerah Istimewa (D.I) Yogyakarta. Penerimaan PDS yang diterima Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa sejak lima periode tahun anggaran terakhir persentase kontribusi penerimaan PBB terhadap APBD D.I. Yogyakarta selalu mengalami penurunan secara berturut-turut sejak tahun 1994/ 1995 - 1999/ 2000, yaitu 19,09 %, 2,40 %, 0,18 %, 0,30 %, 0,27 %. Secara nominal penerimaan PBB pada tahun 1999/ 2000 mengalami penurunan sebesar Rp. 2,323 milyar).

Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan daerah Sendiri (PDS) Terhadap APBD Propinsi DI Yogyakarta Tahun 88/89 - 99/00 (dalam jutaan rupiah)

No	Penerimaan	88/89	89/90	90/91	91/92	92/93	93/94
1. a.	PDS Prop. DIY	231.565	245.612	257.165	268.654	322.056	312.025
b.	PAD Prop. DIY	34.126	38.165	45.126	41.065	34.165	36.125
c.	PBB Prop. DIY	10.819	11.708	12.555	13.556	16.821	22.867
2	Penerimaan APBD Prop. DIY	97.065.520	98.264.812	109.156.581	119.548.498	146.548.950	188.648.974
3. A	% PDS terhadap APBD Prop. DIY (1a:2)	0,239	0,250	0,236	0,225	0,220	0,165
b	% PAD terhadap APBD PROP. DIY (1b:2)	0,035	0,039	0,041	0,034	0,023	0,019
c	% PBB terhadap APBD Prop. DIY (1c:2)	0,01115	0,01192	0,01150	0,01134	0,01148	0,01212
	Perubahan (+ / -)	-	6,90	-3,47	-1,41	1,22	5,60

No	Penerimaan	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	99/00
1. a.	PDS Prop. DIY	292.046	242.385	437.702	393.391	446.086	540.431
b.	PAD Prop. DIY	39.081	49.906	53.497	61.618	39.198	37.865
c.	PBB Prop. DIY	20.547	16.797	26.182	29.559	30.717	28.394
2	Penerimaan APBD Prop. DIY	173.458.149	175.255.497	279.890.680	316.565.936	329.960.073	305.829.708
3. A	% PDS terhadap APBD Prop. DIY (1a:2)	0,168	0,138	0,156	0,124	0,135	0,177
b	% PAD terhadap APBD PROP. DIY (1b:2)	0,023	0,028	0,019	0,019	0,012	0,012
c	% PBB terhadap APBD Prop. DIY (1c:2)	0,01185	0,00958	0,00935	0,00934	0,00931	0,00928
	Perubahan (+ / -)	-2,27	-19,09	-2,40	-0,18	-0,30	-0,27

Sumber : Nota Keuangan dan APBD DI. Yogyakarta Tahun 1999/2000

Fenomena di atas menimbulkan pertanyaan, mengapa penerimaan PBB di D.I. Yogyakarta tidak stabil? Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB, yaitu jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana dan PDRB per Kapita.

Jumlah surat penagihan merupakan pencerminan dari kapasitas administrasi mempengaruhi kemampuan pemungutan pajak, untuk mencapai penghasilan maksimum, dan menggali potensi perpajakan suatu negara. Jumlah wajib pajak yang meningkat juga akan menaikkan penerimaan pajak PBB. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dari pihak masyarakat, baik jumlah dan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dana pembangunan prasarana dapat meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), atau yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai objek pajak, pada akhirnya menjadi objek pajak PBB. Oleh sebab itu kenaikan dana pembangunan prasarana dapat meningkatkan penerimaan PBB. PDRB per kapita merupakan cermin dari pendapatan masyarakat, semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar PBB semakin meningkat, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB pula.

Berdasarkan uraian tersebut, timbul ide untuk mengadakan penelitian guna penyusunan thesis dengan judul : "Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Penerimaan PBB D.I. Yogyakarta persentase kontribusinya terhadap APBD selalu mengalami penurunan sejak tahun 1994/ 1995 - 1999/ 2000, yaitu 19,09 %, 2,40%, 0,18 %, 0,30 %, 0,27 %. Penerimaan PBB tersebut pada tahun 1999/ 2000 mengalami penurunan sebesar Rp. 2,323 miliar, padahal terdapat potensi untuk meningkatkan penerimaannya.

Masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: “Mengapa penerimaan PBB di D.I. Yogyakarta mengalami penurunan?”. Secara lebih khusus masalah tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan:

1. Apakah jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana dan PDRB per Kapita berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di D.I. Yogyakarta?
2. Bagaimana kebijakan (implementasi strategis) untuk meningkatkan penerimaan PBB di D.I. Yogyakarta?

Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB, mengingat adanya keterbatasan pengetahuan, pada penelitian ini dibatasi pada faktor jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana dan PDRB per Kapita.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh besarnya jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana dan PDRB per Kapita terhadap penerimaan PBB di D.I. Yogyakarta.
3. Untuk merumuskan kebijakan (implementasi strategis) dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB di D.I. Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan PBB.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan yang merupakan hak pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Guritno Mangkusburoto,1993). Pengertian tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suparmoko (1995), yang mengartikan pajak sebagai pembayaran iuran dari rakyat kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

Musgrave (1993) secara tegas menyatakan bahwa pajak dan pungutan ditarik dari sektor swasta tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Soemitro (1991) juga menegaskan bahwa dari segi makro ekonomi pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor Swasta ke sektor Pemerintah, berdasarkan peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan mengurangi income anggota masyarakat, tanpa memperoleh imbalan yang secara langsung tetapi sebaliknya pajak merupakan income bagi masyarakat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran masyarakat/ negara.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat diambil kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang yang bersifat memaksa bagi warganya.
2. Pajak yang dibayar tidak diberikan kontraprestasi secara langsung bagi pembayar pajak.
3. Pajak dipungut dari masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.

Pada dasarnya pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan regulator. Sebagai fungsi budgetair, pajak merupakan alat untuk mengumpulkan dana melalui Kas Negara bagi pembiayaan pembangunan. Pemerintah sangat mengharapkan penerimaan pajak selalu meningkat karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Di samping itu pengeluaran pemerintah setiap tahunnya meningkat sejalan dengan makin meningkatnya pula kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Adolf Wagner sebagai "*Law of Ever Increasing State*", yaitu hukum tentang selalu meningkatnya kegiatan pemerintah (Suparmoko, 1995).

Pada fungsi regulator, pajak dimaksudkan untuk mengatur perekonomian yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Artinya, pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menjalankan peranannya. Peranan pemerintah dalam arti luas adalah mengatur kegiatan-kegiatan produsen dan konsumen mencapai tujuan masing-masing.

Pemerintah dalam rangka mengenakan pajak kepada masyarakat, perlu memperhatikan sistem dan prinsip yang baik. Musgrave (1993) menyatakan bahwa sistem pajak yang baik mencakup unsur-unsur: ketepatan penerimaan/ pendapatan pajak, distribusi beban pajak yang adil, ketepatan subyek pajak, meminimumkan terhadap keputusan perekonomian dalam hubungannya dengan pasar yang efisien, memudahkan dalam kebijakan fiskal dan menerapkan administrasi yang wajar, tegas/pasti serta dipahami oleh Wajib Pajak dengan biaya administrasi dan biaya-biaya lain yang serendah mungkin. Adapun prinsip pajak yang baik, sebagai mana dikemukakan oleh Adam Smith harus mencerminkan adanya kesamaan/ keadilan, kepastian, kecocokan/ kelayakan maupun prinsip ekonomi (Suparmoko, 1995).

2.2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang bersifat kebendaan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan pajak lama yang belum mempunyai dasar hukum yang kuat. Peraturan pajak yang lama tersebut, antara lain (Mardiasmo, 1992):

- Ordonansi pajak rumah tangga tahun 1908.
- Ordonansi verponding Indonesia tahun 1923.
- Ordonansi verponding tahun 1928.
- Ordonansi pajak kekayaan tahun 1932

- Ordonansi pajak jakan tahun 1942.
- Undang-undang Darurat No.11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, khususnya pasal 14 huruf J, K, L.
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 11 tahun 1957 tentang Pajak Hasil Bumi, yang dengan UU No. 1 tahun 1961 telah ditetapkan menjadi undang-undang.

Pembaharuan sistem pajak ini meliputi berbagai pungutan atas tanah dan bangunan, tarif pajak dan cara pembayaran, dengan harapan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan PBB juga akan meningkat. Sedangkan yang menjadi tujuan dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah untuk (Soemitro, 1991) :

1. Menyederhanakan Peraturan Perundang-undangan Pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat.
2. Memberikan dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak bergerak dan sekaligus menyasikan pajak tersebut.
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat mengerti hak dan kewajibannya.
4. Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama.
5. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah.

6. Menambah penghasilan bagi daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan cara menghimpun dana yang disukai, karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pemilik tanah menarik manfaat dari investasi pemerintah dalam layanan masyarakat dan prasarana. Hal ini berdasarkan atas “asas manfaat” bahwa pemilik tanah wajib diminta membayar pajak sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya.
2. Pemilik tanah pada umumnya memiliki kemampuan membayar pajak yang tinggi, karena pemilik tanah dapat dijadikan ukuran, meski agak kasar mengenai kemampuan membayar pajak.
3. Pajak tanah dan bangunan setidaknya-tidaknyanya sepiantas lalu dari sudut tata usaha tidak sulit dilaksanakan, dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain, karena dasar pajak tanah bangunan tampak dan tidak bergerak. Pemilikan sulit disembunyikan dan tanah bersangkutan dapat dijadikan jaminan selama kewajiban pajak belum dipenuhi.
4. Pajak tanah dan bangunan, jika dirancang secara baik, dapat menjadi sumber penerimaan yang besar, stabil dan elastis. Kadar elastisitas tergantung pada sampai seberapa besar jauh tanah bersangkutan dapat ditaksir dengan teratur dan dinilai menurut harga pasar yang berlaku.
5. Pajak tanah dan bangunan juga dapat memperkuat peranan Pemerintah Daerah, karena membuka peluang dasar pajak yang lebih luas bagi penerimaan pemerintah sendiri. Pajak tanah dan bangunan yang efektif akan menciptakan

sumber penerimaan yang kuat bagi pemerintah daerah dan memperkecil kebutuhan akan bantuan dari pemerintah pusat.

6. Pajak tanah dan bangunan juga akan mendorong pemilik tanah untuk menggunakan tanah miliknya dengan sebaik-baiknya. Pajak bumi dan bangunan atas nilai pasar (nilai pakai plus nilai pengembangan) akan menyebabkan mahal bagi pemilik tanah untuk membiarkan tanah itu kosong atau kurang dimanfaatkan (Nick Devas, dkk, 1997).

Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No. 12 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985, sebagai mana diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994 tentang Perubahan Sistem Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut bahwa dasar pemungutan PBB berupa nilai sewa (atau hasil) per tahun, kemudian diubah menjadi nilai jual bumi dan bangunan. Nilai jual ini diperoleh dari nilai jual sebenarnya bumi bersangkutan (yaitu transaksi pasar).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat tetapi hasil penerimaannya sebagian besar diserahkan kepada daerah, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II. Pajak ini dikenakan atas harta tak bergerak dan yang dipentingkan adalah obyeknya bukan subyeknya. Karena subyek pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh karena itu PBB sifatnya obyektif.

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan setiap tahun dan pajak terhutang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak tidak dapat dilimpahkan pada orang lain. Jadi PBB

adalah pajak langsung. Menurut UU No. 12 tahun 1994 pasal 2 sebagai mana diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994, yang menjadi obyek PBB adalah bumi dan/ atau bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang berada dibawahnya (permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman). Secara umum yang dimaksud dengan bumi tidak lain adalah tanah, yang meliputi tanah pekarangan, sawah, empang, perairan dan laut.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, (misal : rumah, gedung kantor hotel dan pabrik). Disamping itu yang termasuk dalam pengertian bangunan dapat berupa jalan lingkar yang terletak dalam satu kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat penampungan atau kilangminyak, fasilitas yang memberikan manfaat.

Adapun yang dimaksud dengan subyek PBB menurut UU No. 12 tahun 1985 pasal 2 sebagai mana diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994 adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan; memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan dan memiliki, menguasai atas bangunan. Dengan kata lain setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan memperoleh manfaat atas bumi dan /atau bangunan dapat dikenakan pajak bumi dan bangunan, sekalipun orang atau badan tersebut menyewa atau hanya sekedar numpang.

Subyek pajak bumi dan bangunan belum tentu merupakan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang harus didaftarkan oleh orang atau badan sebagai subyek pajak

adalah : pertama, semua tanah yang dimiliki dengan suatu hak dan/ atau dimanfaatkan.

Kedua, semua bangunan yang dimiliki dan/ atau dikuasai serta dapat dimanfaatkan.

Menurut UU NO. 12 tahun 1985 pasal 3 sebagai mana diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994 obyek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah obyek pajak yang :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.
4. Digunakan perwakilan diplomatik, konsulat dengan syarat negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas nampak jelas bahwa bumi dan bangunan nyata-nyata digunakan untuk kepentingan umum, dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan.

2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB

Machfud Sidik menyatakan bahwa upaya peningkatan penerimaan PBB, secara umum mempunyai beberapa kendala/ hambatan, antara lain dalam kegiatan pendataan terhadap objek dan subjek pajak, sistem penilaian dan penetapan, sistem penerimaan, penagihan serta kegiatan pemungutan dan penjatuhan sanksi. Jumlah tunggakan yang relatif besar dan cenderung meningkat merupakan salah satu indikasi dari adanya permasalahan dalam sistem penerimaan, penagihan serta penjatuhan sanksi (Tim Penelitian Direktorat PBB dan Fakultas Ekonomi Undip, 1997).

Tubagus (1992) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah :

1. Kapasitas Administrasi yang tercermin dari jumlah penagihan.
2. Jumlah Penetapan yang berlandaskan pada Perangkat UU dan Peraturan Pelaksanaannya.
3. Jumlah Wajib Pajak yang berlandaskan pada masyarakat, khususnya Wajib Pajak dan lingkungannya.

Secara satu persatu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kapasitas Administrasi

Kapasitas Administrasi pemerintah pada umumnya dan administrasi perpajakan khususnya jelas mempengaruhi kemampuan pemungutan pajak. Dalam hal ini untuk dapat melayani pemenuhan kewajiban perpajakan dan sekaligus menggali potensi perpajakan perlu diterapkan sistem interchecking, baik antar Kantor Pelayanan (KP)

PBB maupun dengan menggunakan cross data dari instansi di luar KP-PBB, misalnya Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (Zandjani, 1992).

Kaitan potensi perpajakan dengan administrasi perpajakan sangat erat. Dalam hal ini Kaldor berpendapat bahwa administrasi yang efisien yang terdiri dari orang-orang yang integritasnya tinggi. Biasanya merupakan syarat terpenting untuk mencapai penghasilan maksimum, dan menggali potensi perpajakan suatu negara (Todaro, 1994).

Sistem administrasi perpajakan yang berlaku, seperti pengukuhan/ penunjukan wajib pajak, penetapan, pemungutan dan penagihan terhutang pajak, termasuk PBB adalah sebagai berikut (Gunadi, 1992):

a. Sistem Pemungutan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak dikenal adanya 3 sistem dan Indonesia menganut sistem ketiga-tiganya, sistem yang dimaksud adalah :

- 1) *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menetapkan pajaknya bagi setiap Wajib Pajak. Ciri yang melekat pada sistem ini adalah Wajib Pajak bersifat pasif dan pajak yang harus dibayar tergantung pada ketetapan fiskus.
- 2) *Self Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
- 3) *With Holding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 1997).

b. Registrasi dan Surat Pemberitahuan

Sesuai dengan ketentuan perpajakan, dalam sistem *official assessment* kepada WP dikirimkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk diisi dan dikembalikan ke KP-PBB. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) sebagai sarana bagi WP untuk memberikan keterangan mengenai Objek/ Subjek Pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung ketetapan PBB dan menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

c. Penetapan

Penetapan pajak selain dihasilkan berdasarkan data dari SPOP yang disampaikan WP, juga berasal dari hasil pemeriksaan dan informasi lain. Informasi tersebut dapat berupa akte dari notaries, data departemen perdagangan maupun dari pemerintah daerah.

d. Penagihan

Penagihan pajak dilakukan berdasarkan utang pajak yang belum dibayar (tunggakan pajak) yang tercantum dalam ketetapan pajak. Kegiatan penagihan ini dapat dijadikan indikator seberapa besar tunggakan pajak dapat direalisasikan. WP apabila sampai batas-batas waktu tertentu belum juga melunasi utang pajaknya, maka akan dilakukan tegoran. Dalam waktu satu minggu apabila

tegoran tidak ditanggapi maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dimana ketetapan nya ditambah 25% dari hasil perhitungan PBB.

e. Keberatan dan Banding

WP yang kurang puas dengan hasil penetapan pajak dapat menyampaikan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak (melalui Kantor Pelayanan Pajak PBB) dalam waktu tiga bulan sejak tanggal ketetapan. Dalam kurun waktu 12 bulan Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan keberatan. Apabila waktu tersebut terlampaui maka keberatan WP diterima. WP yang kurang puas dengan putusan keberatan dapat menyampaikan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal putusan keberatan. Keputusan keberatan/ banding berupa menerima/ menolak permohonan Wajib Pajak.

2. Jumlah Penetapan yang Mengacu Perangkat Undang-undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaaan

Penetapan pajak dihasilkan dari pemeriksaan pajak dan informasi lain. Tujuan utama pemeriksaan adalah untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin banyak pemeriksaan dilakukan semakin besar penetapan dihasilkan dan peluang untuk menambah penerimaan juga makin besar.

Perangkat Undang-undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaannya sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pemungutan pajak dan juga mengingat hakekat pajak merupakan pungutan oleh pemerintah yang dapat dipaksakan kepada

warganya. Undang-undang Perpajakan yang dikeluarkan termasuk pengaturan pelaksanaannya harus sesuai dengan keadaan masyarakat serta dapat digunakan untuk menggali potensi pajak yang ada. Pemerintah perlu memperhatikan Prinsip-prinsip Perpajakan yang baik.

Prinsip-prinsip perpajakan yang baik menurut Adam Smith (Suparmoko, 1986) adalah :

- a. Prinsip kesamaan/keadilan (*equity*), beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap Wajib Pajak. Artinya, orang yang penghasilannya sama harus dikenakan pajak yang sama.
- b. Prinsip kepastian (*certainty*), pajak dikenakan berdasarkan kepastian hukum yang bersifat tegas, jelas, dan pasti bagi Wajib Pajak maupun aparat perpajakan.
- c. Prinsip kecocokan/kelayakan (*convenience*), pajak hendaknya dikenakan pada saat Wajib Pajak merasa senang, misalnya mempunyai uang.
- d. Prinsip ekonomi (*economy*), dalam memungut pajak, hendaknya tidak menimbulkan biaya yang lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya.

Musgrave (1993) berpendapat bahwa agar penerapan pajak berjalan baik diperlukan sistem pajak yang baik pula, meliputi :

- a. Penerimaan/ pendapatan pajak harus ditentukan dengan tepat.
- b. Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan pembayaran sesuai dengan kemampuannya.

- c. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik-titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut pada akhirnya harus ditanggung.
- d. Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian, dalam hubungannya dengan pasar yang efisien.
- e. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
- f. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dipahami oleh Wajib Pajak.
- g. Biaya administrasi dan biaya - biaya lainnya, harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

3. Masyarakat, Khususnya Wajib Pajak dan Keadaan Lingkungannya

Pemungutan pajak tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari pihak masyarakat. Dalam hal ini penulis akan mengamati peran serta Wajib Pajak dalam meningkatkan penerimaan PPB, yang meliputi jumlah dan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun yang dimaksud dengan subyek PBB menurut UU No. 12 tahun 1994 Pasal 4 adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan; memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan dan memiliki, menguasai atas bangunan. Dengan kata lain setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan memperoleh manfaat atas

bumi dan/ atau bangunan dapat dikenakan pajak bumi dan bangunan, sekalipun orang atau badan tersebut menyewa atau hanya sekedar numpang.

Rochmat Soemitro (1989) menyatakan bahwa pemilik tanah menarik manfaat dari investasi pemerintah dalam layanan masyarakat dan prasarana. Hal ini berdasarkan atas “asas manfaat” bahwa pemilik tanah wajib diminta membayar pajak sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya.

Subyek pajak bumi dan bangunan belum tentu merupakan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang harus didaftarkan oleh orang atau badan sebagai subyek pajak adalah: pertama, semua tanah yang dimiliki dengan suatu hak dan /atau dimanfaatkan. Kedua, semua bangunan yang dimiliki dan /atau dikuasai serta dapat dimanfaatkan.

Selain ketiga faktor tersebut di atas, faktor lain yang mempengaruhi penerimaan PBB adalah:

1. Dana Pembangunan Masyarakat

Penelitian oleh Insukrindo dkk (1994) menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan *assessment ratio* dari 20% menjadi 30% yang disertai dengan perubahan tingkat BTKP menjadi NJOP – TKP mempunyai pengaruh terhadap penerimaan daerah dan jumlah obyek pajak yang tidak kena pajak. Kenaikan rasio mengakibatkan pokok ketetapan PBB mengalami kenaikan sebesar 10% sampai dengan 50%. Perubahan BTKP menjadi NJOP – TKP yang dibuat kategori kelas rendah, sedang dan tinggi diperoleh hasil bahwa di wilayah pedesaan terdapat 70% obyek termasuk kategori bangunan kelas rendah bebas

dari PBB, sedangkan obyek pajak kategori bangunan kelas menengah terdapat 30% obyek pajak yang bebas dari PBB. Jumlah obyek pajak di perkotaan yang tidak ada bangunannya 40% tidak kena pajak, sedangkan di pedesaan 65% tidak kena pajak.

Hasil penelitian itu membuktikan bahwa perkembangan pembangunan yang di wilayah setempat akan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak, atau yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai objek pajak, pada akhirnya menjadi objek pajak PBB. Pembangunan daerah mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di daerah yang dilakukan oleh masyarakat. Pembangunan daerah yang dilaksanakan diharapkan dapat menghasilkan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil pembangunan daerah ini meliputi peningkatan di bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat, ketersediaan prasarana yang dibangun, sebagai salah satu faktor yang menentukan klasifikasi penilaian tanah dan/ bangunan yang berdasarkan kondisi lingkungan obyek pajak.

Realisasi dana pembangunan prasarana daerah menunjukkan tingkat fasilitas yang sudah dibangun yang dapat mendukung dan meningkatkan kelas obyek pajak khususnya kelas bumi serta dapat meningkatkan NJOP secara langsung. Semakin tinggi dana yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana daerah, semakin tinggi pula penerimaan PBB yang diperoleh melalui penyesuaian (peningkatan) ketetapan pajak terhadap obyek pajak yang berada di lingkungan wilayah pembangunan prasarana tersebut.

UPT-POSTAK-UNDIP

2. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat yang tercermin dalam PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) juga akan mempengaruhi penerimaan PBB. Pendapatan masyarakat menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk untuk membayar pajak. Semakin besar tingkat pendapatan per kapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan PBB.

Rochmat Soemitro (1989) menyatakan bahwa pemilik tanah pada umumnya memiliki kemampuan membayar pajak yang tinggi, oleh karenanya pemilik tanah dapat dijadikan ukuran, meski agak kasar mengenai kemampuan membayar pajak. Kenneth Davey (1995) dalam teori elastisitasnya menyatakan bahwa PDRB, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Bahwa apabila PDRB dan jumlah penduduk (yang menjadi Subyek Pajak) mengalami perubahan (kenaikan) sebesar 1 %, maka penerimaan PBB akan mengalami perubahan sebesar jumlah persentase PDRB dibagi jumlah penduduk wilayah yang bersangkutan.

Elastisitas adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah, dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis, misalnya bila harga-harga meningkat, penduduk disuatu daerah berkembang dan pendapatan individu juga bertambah.

Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan pajak mengeluarkan beberapa pengeluaran, antara lain : ongkos pungut akan menjadi besar, upaya administrasi terbagi-bagi, pembebanan sulit dicapai secara adil, kesabaran masyarakat akan hilang dengan banyaknya pungutan yang kecil-kecil dan kesan yang tidak benar dapat timbul terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah. Keadaan tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memusatkan perhatian pada usaha pemungutan pajak yang menghasilkan pendapatan yang besar sehingga dapat membiayai sebagian besar pengeluaran atas pelayanan yang diberikan.

Hasil penelitian Tim Penelitian Direktorat PBB dan Fakultas Ekonomi Undip (1997) menyimpulkan bahwa kelemahan utama dalam kinerja PBB secara eksternal yang paling dominan adalah kondisi sosial ekonomi, peran serta jajaran Pemda serta kesadaran wajib pajak. Sedangkan secara internal (di Propinsi Dati I Jawa Tengah) terutama terletak pada faktor pengorganisasian data pendukung, yang meliputi: 1) Akurasi data subyek dan obyek PBB, 2) Pemutakhiran data, 3) Manajemen dan penilaian masal, 4) Keterbatasan dana dan 5) Koordinasi dengan instansi terkait.

Penelitian yang berkaitan dengan perpajakan yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, yang dapat diajukan acuan dalam penelitian ini, adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh B. Eko Boedi Listyanto (1999) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB di Semarang, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah Wajib Pajak, penetapan dan penagihan (tunggakan rekening listrik) terhadap penerimaan pajak tersebut.

2. Penelitian yang dilaksanakan Tri Handayani (1999) tentang analisis penerimaan PBB di Kotamadia Dati II Yogyakarta, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB dan dana pembangunan prasarana terhadap penerimaan pajak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka variabel bebas yang mempengaruhi penerimaan PBB :

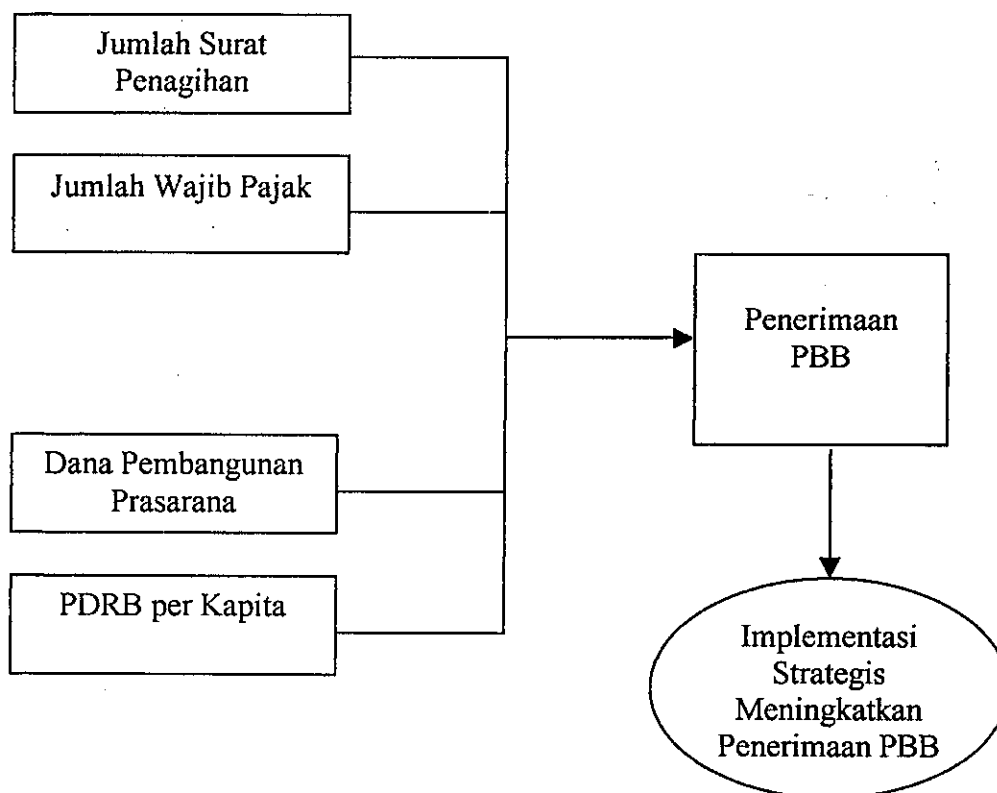
1. Jumlah surat penagihan (X_1)
2. Jumlah wajib pajak (X_2)
3. Dana Pembangunan Prasarana Daerah (X_3)
4. PDRB per Kapita (X_4)

2.4. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan teori yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penagihan, jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana dan PDRB per Kapita secara teoritis mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PBB. Apabila dalam penelitian ini variabel-variabel tersebut terbukti signifikan maka dapat dirumuskan implikasi manajerial (strategis) yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PBB.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pikir



2.5. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teori dan kerangka pikir yang diajukan, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga jumlah surat penagihan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

2. Diduga jumlah wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.
3. Diduga dana pembangunan prasarana mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.
4. Diduga Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.
5. Diduga jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana, dan pendapatan domestik regional bruto secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yaitu data tahunan berdasarkan runtut waktu (*time series*), yang bersumber dari :

1. Data jumlah penerimaan PBB dari TA (Tahun Anggaran) 1988/ 1989 - 1999/ 2000 dari KPP-PBB di D.I. Yogyakarta, baik secara keseluruhan se propinsi D.I. Yogyakarta maupun per Daerah Tingkat II, yaitu Kodia Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman selama 12 tahun (secara keseluruhan berjumlah 72 data).
2. Data PDRB per kapita dan Dana Pembangunan Prasarana dari Kantor BPS D.I. Yogyakarta TA (Tahun Anggaran) 1988/ 1989 - 1999/ 2000, baik secara keseluruhan se propinsi D.I. Yogyakarta maupun per Daerah Tingkat II, yaitu Kodia Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman selama 12 tahun (secara keseluruhan berjumlah 72 data).

Data tersebut di atas, dikumpulkan dengan memeriksa dokumen-dokumen yang ada.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional dari variabel penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah surat penagihan adalah jumlah SKP (Surat Ketetapan Pajak) per tahun yang diterbitkan KP-PBB D.I. Yogyakarta pada Tahun Anggaran 1988/1989 - 1999/2000. SKP dikeluarkan satu minggu setelah WP tidak menanggapi tegoran dari KP-PBB D.I. Yogyakarta, karena belum membayar PBB. SKP berisi besarnya pajak terhutang (termasuk denda administrasi)
2. Jumlah wajib pajak adalah jumlah Wajib Pajak PBB yang terdaftar di KP-PBB D.I. Yogyakarta per tahun pada Tahun Anggaran 1988/1989 - 1999/2000.
3. Dana pembangunan prasarana adalah besarnya realisasi anggaran pembangunan di D.I. Yogyakarta per tahun pada Tahun Anggaran 1988/1989 - 1999/2000 berdasarkan harga konstan IHK = 1993
4. Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita adalah besarnya angka PDRB per Kapita di D.I. Yogyakarta per tahun pada Tahun Anggaran 1988/1989 - 1999/2000 berdasarkan harga konstan IHK = 1993. PDRB per Kapita merupakan pencerminan dari pendapatan masyarakat yang dapat menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak.

5. Penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PPB di Kantor Pelayanan PBB D.I. Yogyakarta per tahun pada Tahun Anggaran 1988/1989 - 1999/2000 berdasarkan harga konstan IHK = 19993.

3.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan umum regresi linier berganda atas empat variabel bebas dengan model sebagai berikut (Damodar Gujarati, 1992):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 \dots + \mu$$

Keterangan :

Y = Penerimaan PBB

X₁ = Jumlah penagihan

X₂ = Jumlah Wajib Pajak

X₃ = Dana Pembangunan Prasarana

X₄ = PDRB per Kapita

a = Intersep/ konstanta

b₁ = Koefisien regresi penagihan

b₂ = Koefisien regresi Wajib Pajak

b₃ = Koefisien regresi Dana Pembangunan Prasarana

b₄ = Koefisien regresi PDRB per Kapita

μ = *Disturbance Error* (variabel pengganggu).

Mengingat terdapat beberapa perbedaan satuan dari variabel yang diteliti, maka sebelumnya dilakukan proses “penurunan” melalui model Beta Koefisien (*standardized regression coefficients*) agar terdapat kesamaan satuan (Supranto, 1993).

Untuk mengetahui kebaikan dari model persamaan di atas maka perlu dihitung koefisien determinasinya (R^2), yaitu angka yang menunjukkan besarnya kemampuan menerangkan dari seperangkat variabel independen dengan variabel dependen pada fungsi tersebut (Supranto, 1993). Nilai dari R^2 ini berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Semakin besar nilai R^2 maka hubungan kedua variabel tersebut kuat atau model tersebut dikatakan baik.

Uji Hipotesis untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel *independent* secara bersama-sama terhadap variabel *dependent*, dilakukan dengan menggunakan uji F, dengan tingkat signifikansi 5% dan uji satu sisi (*one-tail*). Tingkat signifikan secara parsial diperhitungkan melalui program SPSS sekaligus dalam satu paket perhitungan pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* (baik secara parsial maupun secara bersama-sama dengan uji F).

Sebelum analisis uji signifikansi dilakukan, terlebih dulu akan dilakukan analisis uji penyimpangan uji klasik yang mungkin terjadi dari data masing-masing variabel, meliputi uji terhadap gejala autokorelasi (serial korelasi) dan multikolinearitas.

1. Uji terhadap gejala autokorelasi

Gejala autokorelasi merupakan kesalahan pengganggu μ yang berhubungan dengan data observasi ke- i tidak akan dipengaruhi oleh kesalahan pengganggu μ_i ($i = 1, 2, 3, 4$). Jadi kesalahan pengganggu tersebut berkorelasi satu sama lainnya. Uji terhadap gejala autokorelasi dideteksi dengan test Durbin-Watson. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai "d" dengan nilai kritisnya yaitu d_L (bawah) dan d_U (atas) pada tabel Durbin-Watson tingkat signifikan 5 %.

Jadi bila H_0 adalah dua ujung yaitu tidak ada autokorelasi positif maupun negatif, maka :

$d < d_L$ dan $d > 4-d_L$: H_0 ditolak atau H_a diterima

$d_U < d < 4-d_U$: H_0 diterima atau H_a ditolak

2. Uji gejala multikolinearitas

Pengujian ini untuk memenuhi asumsi linier regresi klasik yaitu tidak adanya hubungan atau korelasi sempurna atau kurang sempurna antara variabel bebas. Bila terdapat korelasi sempurna maka koefisien regresi tidak dapat ditentukan dengan ketelitian yang tinggi. Pendeteksian dengan cara meregresi tiap variabel bebas. Kemudian menghitung nilai distribusi F dari tiap variabel bebas. Apabila $F_{hitung} > F_{kritis}$ maka terdapat multikolinearitas antara masing-masing variabel bebas.

Data/ informasi yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif akan dilakukan analisis deskriptif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Keadaan Daerah Penelitian

4.1.1. Letak dan Luas Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi lautan Indonesia yang membentang luas, sedangkan dibagian timur laut, barat laut, dan barat dibatasi oleh wilayah Jawa Tengah yang meliputi :

- Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara
- Kabupaten Klaten di bagian timur laut
- Kabupaten Magelang di bagian barat laut
- Kabupaten Purworejo di bagian barat

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak diantara :

- $7^{\circ} . 33'$ sampai $8^{\circ} . 12'$ Lintang Selatan
- $110^{\circ} . 00'$ sampai $110^{\circ} . 50'$ Bujur Timur

Secara keseluruhan jumlah Kecamatan dan Kelurahan berikut luas daerahnya di D.I. Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan dengan Luas Daerah di D.I. Yogyakarta Tahun 1999

KABUPATEN/ KOTAMADIA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	LUAS Km ²
KULONPROGO	12	88	586,277 (18,40%)
BANTUL	17	75	506,85 (15,91%)
GUNUNGKIDUL	15	144	1.485,36 (46,62%)
SLEMAN	17	86	574,82 (18,04%)
YOGYAKARTA	14	45	32,50 (1,02%)
D. I. Y	75	438	3.185,80

Sumber: BPS DI. Yogyakarta, 2000.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa luas wilayah D.I. Yogyakarta seluruhnya adalah 3.185,80 Km². Wilayah yang terbesar adalah Kabupaten Gunung Kidul dengan luas wilayah 1.485,36 Km² (46,62 %). Adapun klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual permukaan bumi dan nilai jual bangunan sudah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan PBB (lihat Lampiran 1).

4.1.2. Jumlah dan Mata Pencaharian Penduduk

Jumlah penduduk D.I. Yogyakarta tahun 2000 sebesar 3.237.628 jiwa dengan jumlah laki - laki 1.599,377 jiwa (49,40 %) dan perempuan, 1.628.251 jiwa. Rata – rata pertumbuhan penduduk tiap tahun 0,76%. Jumlah rumah tangga adalah 698,787 sehingga rata – rata dalam 1 rumah tangga terdapat \pm 5 jiwa.

Secara keseluruhan jumlah penduduk di D.I. Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di D.I. Yogyakarta Tahun 1999

KABUPATEN/ KOTAMADIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KULONPROGO	212.136	223.089	435.225 (13.44%)
BANTUL	371.949	388.942	760.891 (23.50%)
GUNUNGKIDUL	360.364	375.928	736.292 (22.74%)
SLEMAN	406.706	417.560	824.266 (25.46%)
YOGYAKARTA	248.222	232.732	480.954 (14.86%)
D. I. Y	1.599.377	1.638.251	3.237.628

Sumber: BPS DI. Yogyakarta, 2000.

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar adalah di Kabupaten Sleman (25,46%), dengan luas 574,82 km² maka kabupaten ini merupakan Daerah Tingkat II yang paling padat penduduknya.

4.1.3. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyandang predikat kota pelajar sudah semestinya mendapat tantangan dalam dunia pendidikan, karena di masa mendatang dibutuhkan penduduk yang terdidik supaya dapat bersaing di era global. Peningkatan kualitas SDM dan sarana pendukung lainnya perlu dipersiapkan sedini mungkin

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah sekolah yang di bawah pengelolaan Depdiknas dan non Depdikbud tercatat :

- Jumlah SD 2.468 sekolah, dengan guru 20.042 orang dan murid 306.749 orang.
- Jumlah SLTP 7.738 sekolah, dengan guru 12.745 orang dan murid 169.766 orang
- Jumlah SLTA 375 sekolah dengan guru 7.690 orang dan murid 145.310 orang

Perguruan Tinggi Negeri yaitu UGM, IKIP, IAIN, ISI, STPN dan ATK terdaftar 47.055 mahasiswa dengan 3.746 dosen tetap dan 1.513 dosen tidak tetap, sedangkan perguruan tinggi swasta terdaftar 18,484 mahasiswa dengan 580 dosen dari yayasan dan 133 dosen paruh waktu. Secara keseluruhan jumlah penduduk menurut pendidikan di D.I. Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 4.3 (lihat hal. 34).

Berdasarkan Tabel 4.3 sebagian besar penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tidak tamat SD (26,75 %) dan sebagian lagi yang jumlahnya cukup besar adalah tamatan SMTA (19,87 %). Namun apabila dilihat secara keseluruhan, jumlah penduduk yang telah mengenyam pendidikan lebih banyak dari pada yang belum pernah mengenyam pendidikan. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan ini berpengaruh pada kondisi atau tingkat perekonomiannya.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di D.I. Yogyakarta Tahun 1999.

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Tidak/ Belum Pernah Sekolah	61.344	8,96	161.464	23,92	222.808	16,38
Tidak/Belum Tamat SD	103.632	15,13	94.352	13,98	197.984	14,56
Sekolah Dasar	205.064	29,94	161.112	23,86	366.176	26,92
SMTp	133.632	19,51	94.448	13,99	228.080	16,77
SMTA	107.640	15,71	121.304	17,97	228.944	16,83
Diploma I/II	11.248	1,64	6.032	0,89	17.280	1,27
Diploma III	19.680	2,87	13.776	2,04	33.456	2,46
Universitas	42.768	6,24	22.656	3,36	65.424	4,81
D.I. Yogyakarta	685.008	100,00	675.144	100,00	1.360.152	100,00

Sumber : BPS D.I. Yogyakarta, 2000.

4.2. Hasil Pembangunan yang di Capai

4.2.1. Prasarana Sosial

Fasilitas/ prasarana yang terdapat di D.I. Yogyakarta meliputi:

1). Fasilitas kesehatan:

- Rumah Sakit Umum 22 buah
- Puskesmas 122 buah
- Toko Obat 41 buah
- Apotik 102 buah

2) Hiburan

- Bioskop 23 buah

- Musium	20 buah
- Pentas Kesenian	13 buah
- Obyek wisata	34 buah

3) Ketertiban dan Keamanan

- Napi	297
- Tahanan	176
- Kecelakaan lalu lintas	101 kejadian
- Korban mati	103 orang
- Jumlah kerugian	Rp. 175.205.000

4) Sosial

- Tuna sosial	6.483 orang
- Korban narkoba	1.069 anak
- Bencana alam	113 kejadian
- Korban Bencana	23 orang mati
- Jumlah kerugian	Rp. 518.696.000,00
- Jumlah bantuan	Rp. 25.485.000,00

4.2.2. Pertanian

Kondisi pertanian yang terdapat di D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1) Pertanian

Luas daerah secara keseluruhan dibedakan menjadi lahan sawah seluas 59.192 ha (18,8 %) dan bukan sawah meliputi lahan kering dan lahan berair seluas 258.788 ha (71,2 %)

- Luas panen tanaman bahan makanan yang terluas adalah padi sawah yaitu 97.727 ha dengan produksi 495.896 ton.
- Luas panen sayur-sayuran yang terluas adalah cabe yaitu 3.191 ha dengan produksi 309.831 kwintal
- Luas panen buah-buahan yang terluas adalah pisang yaitu 2.737.858 pohon dengan produksi 262.404 kwintal.
- Luas panen tanaman perdagangan yang terluas adalah kelapa yaitu 43.974 ha dengan produksi 44.395 ton.

2) Kehutanan

Pada hutan seluas 17.064,36 ha, tanaman rimba merupakan yang terluas yaitu 5.992,09 ha. Nilai penjualan hasil hutan mencapai Rp. 10.535.222,-

3) Peternakan

Jumlah ternak yang terbesar yaitu kambing 263.265 ekor, ternak unggas yaitu ayam ras 2.087.127 ekor. Produk telur dari ternak perusahaan 60.712.474 butir dan dari ternak rakyat 87.799.310 butir. Produksi susu dari ternak perusahaan 2.850.536 liter dan dari ternak rakyat 1.371.219 liter.

4.2.3. Industri

Kondisi perindustrian yang terdapat di D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1) Industri

Industri pengolahan besar dan sedang merupakan salah satu sektor yang turut menopang perekonomian. Tercatat 362 unit dimana yang terbanyak adalah industri tekstil pakaian jadi dan kulit yaitu 103 unit (28,45 %). PT/NV merupakan bentuk badan/usaha yang terbanyak yaitu 91 (25,14 %). Dengan bahan bakar yang digunakan umumnya minyak solar.

Industri sangat berperan dalam menyerap tenaga kerja. Tujuan dari perusahaan industri adalah mendapatkan keuntungan setelah dikeluarkan untuk biaya produksi dan lain – lain.

2) Listrik dan Air Minum

Jumlah pelanggan listrik dalam satu dasawarsa setiap tahunnya bertambah 20,06 %. Jumlah pelanggan terbanyak adalah di kabupaten Bantul tetapi pemakaian terbanyak di Kodia Yogyakarta. Pada tahun ini daya yang dibangkitkan 819.316.514 KWH dan yang terjual 755.260.372 untuk penerangan 85,43 % dan untuk industri 14,57 %.

Jumlah pelanggan air minum 32.529 dengan penjualan 11.495.451 m³ dengan nilai penjualan Rp. 5.034.150,-.

4.2.4. Perdagangan

Kondisi perdagangan yang terdapat di D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1) Ekspor

Berdasarkan data dari Kanwil Deperindag Yogyakarta, diperoleh bahwa nilai ekspor tahun ini melebihi impor sebesar 88.591,99 (000 US \$) Ekspor yang terbesar adalah jenis mata dagangan tekstil dan produk tekstil yaitu 38,62 %, menyusul kerajinan kayu/mebelair 17,49 % dan lainnya rata-rata 3,14. Negara tujuan yang banyak menerima hasil ekspor adalah USA, Jepang dan Hongkong yaitu rata – rata 30,64 %.

2) Impor

Impor yang terbesar adalah jenis mata dagangan bahan baku tekstil yaitu 74,95 %, menyusul bahan baku susu 22,08 % dan bahan baku kayu 2,97%. Nilai impor yang terbesar dari negara USA 41,81 %, Australia 41,06 % sedang Singapura, Hongkong, Taiwan, Swiss, Selandia Baru, Belanda, Jerman rata – rata 2,86 %.

4.2.5. Perhubungan

Kondisi perhubungan yang terdapat di D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1) Darat

- Jalan negara	193,434 km
- Jalan	33,790 km

- Jalan kabupaten 4.170,143 km
- Jalan kodia 206,660 km

Kondisi jalan tersebut akan mempengaruhi nilai tanah serta besarnya PBB. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan PBB, khususnya berkenaan dengan Zona Nilai Tanah (NTT) untuk membedakan kelas tanah (Contoh penentuan NTT dapat dilihat pada Lampiran 2).

2) Udara

Pesawat udara sebagai sarana transportasi yang lebih cepat dewasa ini sudah menjadi pilihan alternatif masyarakat. Banyak penumpang yang berangkat 505.892 orang, barang yang dimuat bagasi 2.189.266 kg dan paket pos 806.046 kg dengan memberangkatkan 9.098 pesawat.

3) Hotel

Dari 290.609 tamu domestik dan 76.660 tamu asing yang singgah di hotel bintang 1 s/d hotel Melati, tamu domestik rata – rata lama menginap yang paling lama pada hotel bintang 5 yaitu 4,62. Sedang tamu asing rata – rata lama menginap yang paling lama pada hotel melati yaitu 5,64.

4) Komunikasi

Dari 73.565 sambungan telepon yang terpasang, tercatat bahwa pengguna pulsa telepon terbanyak adalah dari telepon langganan perorangan sebanyak

560.034.834 pulsa dibandingkan dengan klasifikasi telepon lainnya yang rata – rata 2.614.545 pulsa.

4.2.6. Keuangan

Kondisi keuangan yang terdapat di D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1) Keuangan Daerah

Keuangan Daerah yang pengelolanya ditangani oleh Pemerintah Daerah tingkat I dan tingkat II secara terinci sistem pelaporannya harus jelas baik dari penerimaan maupun pengeluarannya, hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap realisasi penerimaan dan pengeluaran dana.

Jumlah penerimaan D.I. Yogyakarta Rp. 135.782.977.000 yang berarti turun 54,03 % dari tahun sebelumnya, terutama karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun 36,39 % serta bagian sumbangan dan bantuan menurun 54,03 %.

Penerimaan Daerah Tingkat II, pada Kabupaten Kulonprogo naik 104,25%, Kabupaten Bantul naik 75,45 %, Kabupaten Gunungkidul naik 105,56 %, Kabupaten Sleman turun 0,54 % dan Yogyakarta naik 38,35 %.

Dalam kondisi perekonomian yang terpuruk dan nilai kurs dolar yang melangit, pengeluaran disegala sektor tidak dapat diperkecil meski sudah dilakukan penghematan. Pengeluaran daerah dari tingkat I dan tingkat II umumnya mengalami kenaikan yang berarti pada pengeluaran rutinnya hampir rata – rata naik 135 %.

2) Perbankan

Data dari Kanwil Departemen Koperasi tercatat 1.262 koperasi, 63 KUD dan 13 koperasi binaan berhasil menghimpun simpanan Rp. 64,399 trilyun, sedang dari Perum Pegadaian tercatat 449.552 nasabah dengan kredit Rp. 112,078 trilyun.

3) Harga - harga

Rata - rata indek harga 9 bahan pokok disetiap kabupaten mengalami kenaikan sekitar sekitar 82,04 %. Kumulatif laju inflasi terus merambah naik dari 6,23 % pada bulan Januari hingga bulan Desember, hal ini akibat dari suhu politik yang memanas dan ekonomi yang labil dengan naiknya kurs US dollar yang melambung mencapai Rp. 16.500 per dollar.

4.3. Sistem Pemungutan PBB

Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB telah melakukan penyempurnaan sistem dan produser perpajakan. dasar hukum yang melandasi pelaksanaan atau pengelolaan pemungutan PBB yang diatur dalam :

1. Undang-undang No.12 tahun 1985 yang sebagaimana diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1988 tentang Batas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.47 tahun 1985 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.971/8567/PUOD tanggal 3 Juli 1986 tentang pelaksanaan pelimpahan wewenang penagihan dan imbalan pembagian biaya pemungutan PBB.
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta No.973/42359, tanggal 28 September 1989 perihal pengaturan lebih lanjut biaya pemungutan PBB.

Sistem pemungutan PBB di Daerah Istimewa Yogyakarta \mulai tahun 1991/1992 telah menggunakan "Sistem Tempat Pembayaran" (SISTEP) dan Sistem Kolektor. SISTEP adalah tata cara pembayaran, penyetoran, pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan PBB melalui tempat yang telah ditentukan, misalnya di kantor Pos dan Giro setempat dan Bank-bank yang telah ditunjuk oleh masing-masing Kepala Daerah Tingkat II.

Penerapan sistem SISTEP ini pada dasarnya tidak semata-mata langsung meningkatkan penerimaan PBB, tetapi lebih berfungsi sebagai bentuk peningkatan pelayanan pembayaran PBB, khususnya untuk mempercepat layanan pembayaran (memperpendek antrian) maupun mendekatkan jarak tempat pembayaran dengan domisili WP yang bersangkutan. Sistem pemungutan PBB dengan SISTEP ini belum bisa sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga terdapat sebagian yang menggunakan sistem non SISTEP yaitu melalui kolektor.

Pemungutan PBB melalui kolektor, biasanya dilakukan di tiap-tiap kelurahan atau desa yang dikoordinir oleh kepala desa setempat. Adapun urutan dari pelaksanaan pemungutan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala desa menunjuk salah satu pamong desa untuk melakukan pemungutan pada tiap-tiap warga atau wajib pajak. Kemudian uang setoran PBB tadi dihimpun atau dicatat dalam DPH (Daftar Penerimaan Harian) yang biasanya terdiri dari empat lembar yaitu :

- Lembar 1 untuk petugas pemungut
- Lembar 1 untuk Dipenda
- Lembar 1 untuk Kecamatan
- Lembar 1 untuk Kelurahan

2. Selanjutnya bukti penyeteroran PBB tadi disampaikan ke kecamatan dan Dipenda. Sedangkan uang hasil setoran PBB dibayarkan ke kantor Pos dan Giro setempat.

Sistem pemungutan PBB dengan perincian dari tiap-tiap sektor.

1. Untuk sektor pedesaan, pemungutan PBB dilakukan oleh Kepala Desa/ Kelurahan setempat atas ijin atau SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II masing-masing.
2. Untuk sektor perkotaan, wajib pajak menyeter PBB nya langsung ke tempat pembayaran, dalam hal ini kantor Pos dan Giro yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB.

3. Untuk sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan, wajib pajak menyetorkan PBB-nya ke kas daerah (bagian keuangan daerah).

4.4. Deskripsi Data Penelitian

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada D.I. Yogyakarta dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, yang antara lain: jumlah penagihan, jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana dan PDRB per Kapita.

Data faktor-faktor dan besarnya penerimaan PBB tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

4.4.1. Jumlah Penagihan

Jumlah penagihan pajak merupakan ukuran dari kapasitas administrasi yang dilaksanakan Kantor Pelayanan PBB. Jumlah penagihan sekaligus dapat digunakan untuk menggali potensi perpajakan. Administrasi yang efisien karena didukung sarana dan petugas yang berdedikasi sesuai peraturan yang berlaku merupakan hal yang terpenting untuk mencapai penagihan pajak dan penggalian potensi pajak secara maksimum.

Penagihan pajak dilakukan atas utang pajak yang belum dibayar (tunggakan pajak) yang tercantum dalam ketetapan pajak. Kegiatan penagihan ini mencerminkan seberapa besar tunggakan pajak dapat dicairkan yang pada akhirnya menjadi penerimaan yang riil untuk pemerintah. Secara rinci jumlah surat penagihan di D.I. Yogyakarta tahun 1988/1989-1999/2000 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Jumlah Surat Penagihan PBB di D.I. Yogyakarta Tahun 1988/1989 - 1999/2000 (dalam lembar surat)

TAHUN	Propinsi D.I. Yogyakarta	+/- %	Kodra Yogyakarta	+/- %	Kabupaten Kulonprogo	+/- %	Kabupaten Bantul	+/- %	Kabupaten Gunungkidul	+/- %	Kabupaten Sleman	+/- %
1988/ 1989	206.716	-	15.986	-	13.491	-	27.968	-	23.656	-	30.245	-
1989/ 1990	212.165	2,64	16.451	2,84	13.851	2,67	28.754	2,81	24.190	2,26	31.062	2,70
1990/ 1991	212.651	0,23	16.481	0,18	13.870	0,14	28.874	0,42	24.241	0,21	31.100	0,12
1991/ 1992	212.902	0,12	16.500	0,12	13.890	0,14	28.898	0,08	24.278	0,15	31.135	0,11
1992/ 1993	213.160	0,12	16.532	0,19	13.910	0,14	28.909	0,04	24.310	0,13	31.185	0,16
1993/ 1994	213.833	0,32	16.505	0,44	13.942	0,23	28.988	0,27	24.388	0,32	31.296	0,36
1994/ 1995	214.604	0,36	16.656	0,31	13.992	0,36	29.065	0,27	24.523	0,55	31.394	0,31
1995/ 1996	217.611	1,40	16.885	1,37	14.185	1,38	29.420	1,22	24.858	1,37	31.900	1,61
1996/ 1997	224.998	3,39	17.440	3,29	14.656	3,32	30.384	3,28	25.745	3,57	32.994	3,43
1997/ 1998	237.381	5,50	18.421	5,63	15.426	5,25	31.967	5,21	27.259	5,88	34.828	5,56
1998/ 1999	252.488	6,36	19.694	6,91	16.379	6,18	33.889	6,01	29.045	6,55	37.084	6,48
1999/ 2000	293.359	16,19	23.284	18,23	19.332	18,03	39.021	15,14	33.167	14,19	43.527	17,37

Sumber: KP-PBB D.I. Yogyakarta, 2000.

Berdasarkan Tabel 4.4 nampak bahwa dari tahun ke tahun jumlah surat penagihan pajak baik secara keseluruhan di Propinsi D.I Yogyakarta maupun pada masing-masing Dati II semakin bertambah banyak, yaitu:

1. Propinsi D.I. Yogyakarta; Pertambahan kenaikan jumlah surat penagihan tertinggi adalah pada tahun 1999/2000 (16,19 %) dan terkecil pada tahun 1991/1992 dan 1992/1993 (masing-masing 0,12%).
2. Kodia. Yogyakarta; Pertambahan kenaikan jumlah surat penagihan tertinggi adalah pada tahun 1999/2000 (18,23 %) dan terkecil pada tahun 1991/1992 (0,12%).
3. Kabupaten Kulonprogo; Pertambahan kenaikan jumlah surat penagihan tertinggi adalah pada tahun 1999/2000 (17,97 %) dan terkecil pada tahun 1991/1992 dan 1992/1993 (masing-masing 0,14%).
4. Kabupaten Bantul; Pertambahan kenaikan jumlah surat penagihan tertinggi adalah pada tahun 1999/2000 (15,14 %) dan terkecil pada tahun 1992/1993 (0,04%).
5. Kabupaten Gunungkidul; Pertambahan kenaikan jumlah surat penagihan tertinggi adalah pada tahun 1999/2000 (14,19 %) dan terkecil pada tahun 1992/1993 (0,13%).
6. Kabupaten Sleman; Pertambahan kenaikan jumlah surat penagihan tertinggi adalah pada tahun 1999/2000 (17,37 %) dan terkecil pada tahun 1991/1992 (0,11%).

Kenaikan jumlah surat penagihan pajak yang harus ditagih melalui proses penagihan mengindikasikan ketaatan wajib pajak PBB yang menurun atau tidak

dengan sukarela membayar ketetapan pajak yang dikeluarkan Kantor Pelayanan PBB D.I. Yogyakarta semakin baik, terutama dalam menggali potensi penerimaan PBB. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya penambahan *man power*. Untuk mengatasi hal tersebut maka penyempurnaan sistem administrasi penagihan serta penyediaan sarana pendukung sangat diperlukan. Sarana pendukung tersebut antara lain adalah petugas penagihan pajak, yang lazim disebut juru sita Pajak Negara dan pedoman pelaksanaan penagihan pajak yaitu UU No 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

4.4.2. Jumlah Wajib Pajak

Jumlah wajib pajak merupakan potensi dari penerimaan pajak, walaupun tidak semua wajib pajak selalu membayar pajak untuk suatu masa pajak tertentu yang dapat disebabkan berbagai hal seperti sengaja atau tidak ada objek yang dapat dikenakan pajak karena sesuatu hal. Dalam perkembangannya, jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun selalu bertambah termasuk di D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perkembangan jumlah wajib pajak (WP) di D.I. Yogyakarta pada tahun 1988/1999 sampai dengan 1999/2000 dapat dilihat pada Tabel 4.5 (lihat hal. 54). Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif), secara rinci yaitu:

1. Propinsi D.I. Yogyakarta

Pertambahan kenaikan jumlah wajib pajak tertinggi adalah pada tahun 1996/1997 (20,24 %) dan penurunan jumlah WP terbesar adalah pada tahun 1995/1996 (19,92%).

Tabel 4.5 Jumlah Wajib Pajak di D.I. Yogyakarta Tahun 1988/1989 - 1999/2000 (dalam orang)

TAHUN	Propinsi D.I. Yogyakarta	+/- %	Kodja Yogyakarta	+/- %	Kabupaten Kulonprogo	+/- %	Kabupaten Bantul	+/- %	Kabupaten Gunungkidul	+/- %	Kabupaten Sleman	+/- %
1988/1989	1.007.747	-	80.089	-	66.152	-	134.598	-	114.189	-	148.890	-
1989/1990	1.090.562	8,22	86.704	8,26	71.845	8,61	146.005	8,47	122.205	7,02	161.874	8,72
1990/1991	1.127.764	3,41	89.584	3,32	74.152	3,21	151.202	3,56	126.168	3,24	167.568	3,52
1991/1992	1.191.358	5,64	94.596	5,59	78.523	5,89	159.958	5,79	133.056	5,46	176.844	5,54
1992/1993	1.218.022	2,24	96.768	2,30	80.121	2,04	163.202	2,03	136.596	2,66	180.708	2,18
1993/1994	1.402.298	15,13	111.818	15,55	92.110	14,96	188.026	15,21	156.556	14,61	208.548	15,41
1994/1995	1.308.556	-6,68	104.350	-6,68	86.546	-6,04	175.210	-6,82	146.096	-6,68	194.251	-6,86
1995/1996	1.047.923	-19,92	83.211	-20,26	70.021	-19,09	139.890	-20,16	118.265	-19,05	154.180	-20,63
1996/1997	1.259.992	20,24	100.356	20,60	83.523	19,28	167.941	20,05	141.905	19,99	186.449	20,93
1997/1998	1.283.049	1,83	102.189	1,83	84.875	1,62	170.990	1,82	144.556	1,87	190.009	1,91
1998/1999	1.285.886	0,22	102.401	0,21	85.060	0,22	171.223	0,14	144.983	0,30	190.477	0,25
1999/2000	1.243.579	-3,29	98.705	-3,61	81.910	-3,70	165.414	-3,39	140.598	-3,02	184.515	-3,13

Sumber: KP-PBB D.I. Yogyakarta, 2000.

2. Kodia Yogyakarta

Pertambahan kenaikan jumlah wajib pajak tertinggi adalah pada tahun 1996/1997 (20,60 %) dan penurunan jumlah WP terbesar adalah pada tahun 1995/1996 (20,26%).

3. Kabupaten Kulonprogo

Pertambahan kenaikan jumlah wajib pajak tertinggi adalah pada tahun 1996/1997 (19,28 %) dan penurunan jumlah WP terbesar adalah pada tahun 1995/1996 (19,09%).

4. Kabupaten Bantul

Pertambahan kenaikan jumlah wajib pajak tertinggi adalah pada tahun 1996/1997 (20,05 %) dan penurunan jumlah WP terbesar adalah pada tahun 1995/1996 (20,16%).

5. Kabupaten Gunungkidul

Pertambahan kenaikan jumlah wajib pajak tertinggi adalah pada tahun 1996/1997 (19,99 %) dan penurunan jumlah WP terbesar adalah pada tahun 1995/1996 (19,05%).

6. Kabupaten Sleman

Pertambahan kenaikan jumlah wajib pajak tertinggi adalah pada tahun 1996/1997 (20,93 %) dan penurunan jumlah WP terbesar adalah pada tahun 1995/1996 (20,63%).

Kenaikan wajib pajak tersebut dapat terjadi karena ekstensifikasi yakni penambahan Wajib Pajak, karena meningkatnya kepemilikan objek pajak berupa tanah dan bangunan serta meningkatnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat yang masa sebelumnya belum terdaftar sebagai Wajib Pajak PBB.

4.4.3. Dana Prasarana Pembangunan

Perkembangan pembangunan yang di suatu wilayah akan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (menunjukkan tingkat fasilitas yang sudah dibangun), atau yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai objek pajak, pada akhirnya menjadi objek pajak PBB.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perkembangan dana pembangunan prasarana di D.I. Yogyakarta pada tahun 1988/1999 sampai dengan 1999/2000 dapat dilihat pada Tabel 4.6 (lihat hal. 57). Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun besarnya dana pembangunan prasarana juga mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif). Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Propinsi D.I. Yogyakarta

Pertambahan kenaikan dana pembangunan prasarana tertinggi adalah pada tahun 1993/1994 (62,76%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1999/2000 (39,66%) dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.6 Dana Pembangunan Prasarana di D.I. Yogyakarta Tahun 1988/1989 - 1999/2000 (dalam rupiah)

TAHUN	Propinsi D.I. Yogyakarta	+/- %	Kodia Yogyakarta	+/- %	Kabupaten Kulonprogo	+/- %	Kabupaten Bantul	+/- %	Kabupaten Gunungkidul	+/- %	Kabupaten Sleman	+/- %
1988/1989	250.219.088	-	33.209.810	-	21.241.050	-	25.415.889	-	25.436.859	-	36.420.841	-
1989/1990	241.694.597	-3,41	32.095.441	-3,36	20.489.107	-3,54	24.580.890	-3,29	24.540.480	-3,52	35.189.101	-3,38
1990/1991	222.304.276	-8,02	29.419.648	-8,34	19.054.001	-7,00	22.556.487	-8,24	22.821.982	-7,00	32.009.844	-9,03
1991/1992	194.689.615	-12,42	25.704.841	-12,63	16.685.748	-12,43	19.847.890	-12,01	19.890.852	-12,84	28.067.897	-12,31
1992/1993	270.162.862	38,77	35.989.402	40,01	23.154.801	36,77	27.465.402	38,38	26.898.423	35,23	39.568.104	40,97
1993/1994	439.721.960	62,76	59.489.474	65,30	37.845.410	63,45	45.205.488	64,59	41.220.189	53,24	65.845.156	66,41
1994/1995	467.651.440	6,35	63.419.040	6,61	40.156.450	6,11	47.971.120	6,12	43.989.820	6,72	69.998.810	6,31
1995/1996	486.401.068	4,01	65.919.810	3,94	41.789.201	4,07	49.761.120	3,73	45.801.018	4,12	72.889.403	4,13
1996/1997	397.411.370	-18,30	53.826.091	-18,35	34.054.899	-18,51	40.911.961	-17,78	37.436.662	-18,26	59.389.118	-18,52
1997/1998	466.839.312	17,47	51.338.375	4,62	38.550.581	13,20	51.159.001	25,05	44.869.346	19,85	73.171.540	23,21
1998/1999	486.109.352	4,13	48.579.478	-5,37	39.262.041	1,85	48.067.225	-6,04	45.271.930	0,90	76.163.741	4,09
1999/2000	292.349.468	-39,86	29.298.404	-39,69	25.541.500	-34,96	30.984.810	-35,54	30.400.811	-32,85	44.598.411	-41,44

Sumber: BPS D.I. Yogyakarta, 2000.

2. Kodia Yogyakarta

Pertambahan kenaikan dana pembangunan prasarana tertinggi adalah pada tahun 1993/1994 (65,30%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1999/2000 (39,69%) dari tahun sebelumnya.

3. Kabupaten Kulonprogo

Pertambahan kenaikan dana pembangunan prasarana tertinggi adalah pada tahun 1993/1994 (63,45%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1999/2000 (34,95%) dari tahun sebelumnya.

4. Kabupaten Bantul

Pertambahan kenaikan dana pembangunan prasarana tertinggi adalah pada tahun 1993/1994 (64,59%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1999/2000 (35,54%) dari tahun sebelumnya.

5. Kabupaten Gunungkidul

Pertambahan kenaikan dana pembangunan prasarana tertinggi adalah pada tahun 1993/1994 (53,24%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1999/2000 (32,85%) dari tahun sebelumnya.

6. Kabupaten Sleman

Pertambahan kenaikan dana pembangunan prasarana tertinggi adalah pada tahun 1993/1994 (66,41%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1999/2000 (41,44%) dari tahun sebelumnya.

Besarnya dana pembangunan prasarana tersebut tergantung dari besarnya pendapatan daerah serta prioritas pembangunan yang dilaksanakan.

4.4.4. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per Kapita penduduk menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk untuk membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perkembangan pendapatan per Kapita penduduk di D.I. Yogyakarta pada tahun 1988/1999 sampai dengan 1999/2000 dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Berdasarkan Tabel 4.7 nampak bahwa dari tahun ke tahun besarnya pendapatan per Kapita juga mengalami kenaikan dan penurunan (fluktuatif). Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Propinsi D.I. Yogyakarta

Pertambahan kenaikan pendapatan per Kapita tertinggi adalah pada tahun 1991/1992 (49,46%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1992/1993 (21,41%) dari tahun sebelumnya.

2. Kodia Yogyakarta

Pertambahan kenaikan pendapatan per Kapita tertinggi adalah pada tahun 1991/1992 (53,30%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1992/1993 (21,80%) dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.7 PDRB per Kapita di D.I. Yogyakarta Tahun 1988/1989 - 1999/2000 (dalam rupiah)

TAHUN	Propinsi D.I. Yogyakarta	+/- %	Kodja Yogyakarta	+/- %	Kabupaten Kulonprogo	+/- %	Kabupaten Bantul	+/- %	Kabupaten Gunungkidul	+/- %	Kabupaten Sleman	+/- %
1988/1989	1.186.559	-	2.220.561	-	1.052.341	-	821.654	-	961.890	-	1.172.569	-
1989/1990	1.030.651	-13,14	1.918.489	-13,60	911.520	-13,38	714.519	-13,04	837.890	-12,89	1.012.801	-13,63
1990/1991	984.894	-4,44	1.826.148	-4,81	869.451	-4,62	680.510	-4,76	801.094	-4,39	963.590	-4,86
1991/1992	1.471.981	49,46	2.799.492	53,30	1.332.165	53,22	1.041.210	53,00	1.151.859	43,79	1.480.489	53,64
1992/1993	1.156.847	-21,41	2.189.085	-21,80	1.048.151	-21,32	813.541	-21,87	909.890	-21,01	1.167.484	-21,14
1993/1994	1.100.565	-4,87	2.085.844	-4,72	1.002.946	-4,31	777.212	-4,47	872.108	-4,15	1.118.809	-4,17
1994/1995	1.148.741	4,38	2.179.897	4,51	1.049.645	4,66	812.556	4,55	908.981	4,23	1.172.984	4,84
1995/1996	1.391.890	21,17	2.650.840	21,60	1.272.164	21,20	985.458	21,28	1.100.689	21,09	1.429.841	21,90
1996/1997	1.569.845	12,79	2.988.491	12,74	1.432.145	12,58	1.109.189	12,56	1.236.488	12,34	1.606.840	12,38
1997/1998	1.781.481	13,48	3.401.637	13,82	1.621.397	13,21	1.262.104	13,79	1.409.122	13,96	1.830.615	13,93
1998/1999	1.499.052	-15,85	2.878.941	-15,37	1.371.250	-15,43	1.078.890	-14,52	1.195.890	-15,13	1.548.910	-15,39
1999/2000	1.186.407	-20,86	2.291.088	-20,42	1.485.451	8,33	890.561	-17,46	959.687	-19,75	1.238.990	-20,01

Sumber: BPS D.I. Yogyakarta, 2000.

3. Kabupaten Kulonprogo

Pertambahan kenaikan pendapatan per Kapita tertinggi adalah pada tahun 1991/1992 (53,22%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1992/1993 (21,32%) dari tahun sebelumnya.

4. Kabupaten Bantul

Pertambahan kenaikan pendapatan per Kapita tertinggi adalah pada tahun 1991/1992 (53%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1992/1993 (21,87%) dari tahun sebelumnya.

5. Kabupaten Gunungkidul

Pertambahan kenaikan pendapatan per Kapita tertinggi adalah pada tahun 1991/1992 (43,79%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1992/1993 (21,01%) dari tahun sebelumnya.

6. Kabupaten Sleman

Pertambahan kenaikan pendapatan per Kapita tertinggi adalah pada tahun 1991/1992 (53,64%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1992/1993 (21,14%) dari tahun sebelumnya.

Besarnya pendapatan per Kapita tersebut tergantung dari besarnya PDRB (Pendapatan Domestik Bruto) dan jumlah penduduknya, sehingga apabila kenaikan jumlah PDRB sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk maka pendapatan per Kapitanya relatif konstan, tetapi apabila kenaikan jumlah PDRB lebih tinggi dari

pertambahan jumlah penduduk maka pendapatan per Kapitanya menjadi lebih tinggi, demikian pula sebaliknya.

4.4.5. Penerimaan PBB

Penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang cukup penting. Pada Propinsi D.I. Yogyakarta kontribusi penerimaan PBB terhadap APBD menempati peringkat kedua, setelah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Perkembangan penerimaan PBB di D.I. Yogyakarta pada tahun 1988/1999 sampai dengan 1999/2000 dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Berdasarkan Tabel 4.8 nampak bahwa dari tahun ke tahun besarnya penerimaan PBB tidak stabil (fluktuatif). Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Propinsi D.I. Yogyakarta

Pertambahan kenaikan penerimaan PBB tertinggi adalah pada tahun 1996/1997 (55,87%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1995/1996 (18,25%) dari tahun sebelumnya.

2. Kodia Yogyakarta

Pertambahan kenaikan penerimaan PBB tertinggi adalah pada tahun 1996/1997 (59,47%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1995/1996 (23,26%) dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.8 Jumlah Penerimaan PBB di D.I. Yogyakarta Tahun 1988/1989 - 1999/2000 (dalam ribuan rupiah)

TAHUN	Propinsi D.I. Yogyakarta	+/- %	Kodja Yogyakarta	+/- %	Kabupaten Kulonprogo	+/- %	Kabupaten Bantul	+/- %	Kabupaten Gunungkidul	+/- %	Kabupaten Sleman	+/- %
1988/1989	10.819.346	-	4.271.898	-	259.567	-	558.510	-	248.807	-	2.206.840	-
1989/1990	11.708.390	8,22	4.578.048	7,17	322.154	24,11	600.569	7,53	266.804	7,23	2.375.644	7,65
1990/1991	12.554.561	7,23	4.914.189	7,34	339.147	5,27	643.151	7,09	286.807	7,50	2.551.081	7,38
1991/1992	13.556.374	7,98	5.288.956	7,63	395.122	16,50	691.265	7,48	308.418	7,54	2.738.904	7,36
1992/1993	16.821.322	24,08	6.619.810	25,16	389.546	-1,41	872.642	26,24	379.659	23,10	3.458.909	26,29
1993/1994	22.866.909	35,94	9.729.841	46,98	621.420	59,52	1.100.519	26,11	475.510	25,25	4.371.085	26,37
1994/1995	20.547.494	-10,14	8.589.018	-11,72	564.301	-9,19	1.001.202	-9,02	432.841	-8,97	3.980.894	-8,93
1995/1996	16.796.984	-18,25	6.589.414	-23,28	482.201	-14,55	855.655	-14,54	376.089	-13,11	3.389.840	-14,85
1996/1997	26.181.830	55,87	10.508.068	59,47	641.210	32,98	1.347.540	57,49	596.899	58,71	5.251.233	54,91
1997/1998	29.558.973	12,90	10.789.087	2,67	701.562	9,41	1.436.017	6,57	663.659	11,18	6.583.705	25,37
1998/1999	30.717.175	3,92	9.962.119	-7,66	803.015	14,46	1.380.501	-3,87	692.582	4,36	7.501.431	13,94
1999/2000	28.393.991	-7,56	9.184.901	-7,80	684.024	-14,82	1.172.152	-15,09	642.680	-7,21	7.105.689	-5,28

Sumber: KP-PBB D.I. Yogyakarta, 2000.

3. Kabupaten Kulonprogo

Pertambahan kenaikan penerimaan PBB tertinggi adalah pada tahun 1993/1994 (59,52%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1999/2000 (14,82%) dari tahun sebelumnya.

4. Kabupaten Bantul

Pertambahan kenaikan pendapatan per Kapita tertinggi adalah pada tahun 1996/1997 (57,49%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1999/2000 (15,09%) dari tahun sebelumnya.

5. Kabupaten Gunungkidul

Pertambahan kenaikan pendapatan per Kapita tertinggi adalah pada tahun 1996/1997 (58,71%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1995/1996 (13,11%) dari tahun sebelumnya.

6. Kabupaten Sleman

Pertambahan kenaikan pendapatan per Kapita tertinggi adalah pada tahun 1996/1997 (54,91%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1995/1996 (14,85%) dari tahun sebelumnya.

Besarnya penerimaan PBB tersebut di atas akan diteliti lebih lanjut apakah benar-benar secara signifikan dipengaruhi oleh jumlah penagihan, jumlah wajib pajak, dana prasarana pembangunan dan pendapatan per Kapita penduduk, sehingga dapat disusun implementasi strategis untuk meningkatkan penerimaan PBB.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dilakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis regresi berganda. Data yang dianalisis berupa data kuantitatif yaitu data jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana prasarana pembangunan serta PDRB per kapita penduduk. Pada analisis ini akan diperhitungkan apakah terdapat pengaruh yang signifikan (nyata) antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen pada taraf signifikan (α)= 5%.

5.1. Persamaan Regresi

5.1.1. Propinsi D.I. Yogyakarta

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan bantuan program SPSS (lihat Lampiran 5B), dapat diketahui persamaan regresi pengaruh antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen secara keseluruhan pada Propinsi D.I. Yogyakarta adalah:

$$Y = 0,504 X_1 + 0,374 X_2 + 0,285 X_3 + 0,247 X_4$$

Signifikansi	:	0,000	0,003	0,014	0,018
Multiple R	:	0,983			
R ² (R Square)	:	0,966			
Adjusted R ²	:	0,946			

Signifikansi F : 49,582

DW : 2,459

5.1.2. Kodia Yogyakarta`

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan bantuan program SPSS (lihat Lampiran 6B), dapat diketahui persamaan regresi pengaruh antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen pada Kodia Yogyakarta adalah:

$$Y = 0,345 X1 + 0,513 X2 + 0,340 X3 + 0,269 X4$$

Signifikansi : 0,009 0,001 0,012 0,023

Multiple R : 0,975

R² (R Square) : 0,950

Adjusted R² : 0,921

Signifikansi F : 33,166

DW : 2,265

5.1.3. Kabupaten Kulonprogo

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan bantuan program SPSS (lihat Lampiran 7B), dapat diketahui persamaan regresi pengaruh antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen pada Kabupaten Kulonprogo adalah:

$$Y = 0,352 X1 + 0,396 X2 + 0,391 X3 + 0,204 X4$$

Signifikansi	:	0,010	0,003	0,004	0,009
Multiple R	:	0,980			
R ² (R Square)	:	0,960			
Adjusted R ²	:	0,938			
Signifikansi F	:	42,381			
DW	:	2,363			

5.1.4. Kabupaten Bantul

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan bantuan program SPSS (lihat Lampiran 8B), dapat diketahui persamaan regresi pengaruh antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen pada Kabupaten Bantul adalah:

$$Y = 0,303 X1 + 0,386 X2 + 0,324 X3 + 0,341 X4$$

Signifikansi	:	0,027	0,013	0,040	0,026
Multiple R	:	0,965			
R ² (R Square)	:	0,930			
Adjusted R ²	:	0,891			
Signifikansi F	:	23,378			
DW	:	2,633			

5.1.5. Kabupaten Gunung Kidul

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan bantuan program SPSS (lihat Lampiran 9B), dapat diketahui persamaan regresi pengaruh antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen pada Kabupaten Gunung Kidul adalah:

$$Y = 0,508 X1 + 0,352 X2 + 0,223 X3 + 0,287 X4$$

Signifikansi	:	0,0001	0,0055	0,0497	0,0122
Multiple R	:	0,981			
R ² (R Square)	:	0,962			
Adjusted R ²	:	0,940			
Signifikansi F	:	43,717			
DW	:	2,728			

5.1.6. Kabupaten Sleman

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan bantuan program SPSS (lihat Lampiran 10B), dapat diketahui persamaan regresi pengaruh antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen pada Kabupaten Sleman adalah:

$$Y = 0,637 X1 + 0,251 X2 + 0,238 X3 + 0,227 X4$$

Signifikansi	:	0,000	0,026	0,048	0,042
Multiple R	:	0,980			
R ² (R Square)	:	0,960			

Adjusted R² : 0,937
Signifikansi F : 41,935
DW : 2,206

Hasil pengujian regresi yang telah diperoleh tersebut di atas masih memerlukan pengujian statistik lebih lanjut untuk mengetahui keabsahan model. Pengujian statistik dalam hal ini meliputi besaran-besaran koefisien determinasi (R²) dan pengujian arti penting secara statistik bagi masing-masing koefisien secara parsial yaitu dengan membandingkan t-hitung yang diperoleh dengan t-tabel dan arti penting secara statistik untuk keseluruhan independen variabel yaitu dengan membandingkan F-hitung dan F-tabel. Pengujian lain berkenaan dengan uji penyimpangan terhadap asumsi klasik yaitu atas gejala multikolinearitas, dan autokorelasi.

5.2. Pengujian Secara Statistik

5.2.1. Propinsi D.I. Yogyakarta

1. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi adalah besaran yang menjelaskan proporsi variabel tidak bebas jumlah penerimaan PBB Propinsi D.I. Yogyakarta yang dijelaskan oleh variabel-variabel bebas, yaitu jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana prasarana pembangunan serta PDRB per kapita. Koefisien Determinasi memiliki nilai

antara 0 sampai 1. Dimana semakin mendekati satu berarti variabel-variabel bebas semakin besar menjelaskan variasi dalam variabel tidak bebas.

Berdasarkan perhitungan SPSS, persamaan regresi yang ditaksir mencocokkan data dengan cukup baik. Nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,966 atau sekitar 97% variasi dalam variabel tidak bebas dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas. Sedangkan sisanya 3% dijelaskan variabel-variabel lain yang tidak masuk dalam model. Sedangkan Adjusted R^2 (Koefisien Determinasi yang disesuaikan) menunjukkan angka 0,946 artinya setelah diperhitungkan dengan derajat kebebasannya ternyata model masih tetap baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas yaitu sebesar 94,6%.

2. Uji Signifikansi Keseluruhan

Pada tahap ini dijelaskan pengujian signifikansi pengaruh dari variabel-variabel yang menjelaskan secara bersama-sama terhadap variabel bebas.

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 \neq 0$$

H_0 diartikan bahwa jumlah penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta tidak mempunyai hubungan linier dengan jumlah surat penagihan, jumlah wajib

pajak, dana prasarana pembangunan serta PDRB per kapita atau seluruh variabel independen tidak mampu menerangkan variabel dependen.

Berdasarkan nilai F-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,000 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, dengan demikian hipotesis 0 ditolak, yang berarti seluruh independen variabel secara bersama-sama mampu menerangkan dependen variabel secara baik.

3. Pengujian Koefisien Regresi (Signifikansi)

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui keberartian masing-masing variabel jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana prasarana pembangunan serta PDRB per kapita secara statistik maka perlu dilakukan uji t. Hasil dari uji t adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Surat Penagihan

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

H_0 berarti jumlah surat penagihan tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan H_1 diartikan sebaliknya,

yaitu jumlah surat penagihan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,000 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel jumlah surat penagihan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah surat penagihan yang dikeluarkan, maka penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta akan semakin meningkat.

b. Jumlah Wajib Pajak

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \beta_2 \neq 0$$

H₀ berarti jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan H₁ diartikan sebaliknya, yaitu jumlah wajib pajak berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,003 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa

variabel jumlah wajib pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini berarti semakin banyak jumlah wajib pajaknya, maka penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta akan semakin meningkat.

c. Dana Pembangunan Prasarana

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_1 : \beta_3 \neq 0$$

H_0 berarti dana pembangunan prasarana tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan H_1 diartikan sebaliknya, yaitu dana pembangunan prasarana berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,014 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel dana pembangunan prasarana secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini berarti semakin besar dana pembangunan prasarana, maka penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta akan semakin meningkat.

d. PDRB per Kapita

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_1 : \beta_4 \neq 0$$

H_0 berarti PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan H_1 diartikan sebaliknya, yaitu PDRB per kapita berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,018 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel PDRB per kapita secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini berarti semakin besar PDRB per kapita, maka penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta akan semakin meningkat.

4. Pengujian Secara Ekonometrik

Setelah pengujian secara statistik di atas, kemudian dilakukan pengujian secara ekonometrik untuk menguji penyimpangan terhadap asumsi klasik atas autokorelasi dan multikolinearitas.

a. Uji terhadap Gejala Autokorelasi

Untuk menguji adanya autokorelasi dalam regresi linier berganda digunakan metode Durbin-Watson.

Hipotesis untuk autokorelasi :

H0 : tidak ada autokorelasi

H1 : ada autokorelasi

Menentukan kriteria pengujian :

1) Untuk autokorelasi positif

- Ho diterima, jika $d > d_u$
- Ho ditolak, jika $d < d_l$
- Tidak ada kesimpulan, jika $d_l < d < d_u$

(karena $d = 2,459$, sedangkan $d_l = 0,57$ dan $d_u = 1,85$, jadi Ho diterima)

2) Untuk autokorelasi negatif

- Ho diterima, jika $(4 - d) > d_u$
- Ho ditolak, jika $(4 - d) < d_l$
- Tidak ada kesimpulan, jika $d_l < (4 - d) < d_u$

(karena $d = 2,459$, sedangkan $d_l = 0,57$ dan $d_u = 1,85$, $4 - d = 1,49813$, jadi

Ho tidak ada kesimpulan)

Dengan demikian H0 diterima, hal ini berarti tidak ada gejala autokorelasi dalam persamaan regresi linier berganda di atas.

b. Uji terhadap Gejala Multikolinearitas

Analisis multikolinearitas dapat dideteksi dengan meregresi tiap X_i atas sisa X dengan menghitung R^2 yang cocok, yang bias disebut R_i^2 , sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 F \text{ kritis} &= \frac{R^2 / (k-2)}{(1-R^2) / (n-k+1)} \\
 &= \frac{0,125 / 3}{0,875 / 8} \\
 &= 0,042 / 0,109 \\
 &= 0,385321
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X_1 terhadap X_2 , X_3 dan X_4 , maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0,385321, sedangkan F hitungnya sebesar 0,37937. Sehingga F hitung < F kritis ($0,37937 < 0,385321$) berarti tidak ada multikolinearitas dalam data).

$$\begin{aligned}
 F \text{ kritis} &= \frac{R^2 / (k-2)}{(1-R^2) / (n-k+1)} \\
 &= \frac{0,272 / 3}{0,728 / 8} \\
 &= 0,091 / 0,091 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X_2 terhadap X_1 , X_3 dan X_4 maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0,99404; sedangkan F hitungnya sebesar 1. Sehingga F hitung < F kritis ($0,99404 < 1$), berarti tidak ada multikolinearitas dalam data).

$$\begin{aligned}
 F \text{ kritis} &= \frac{R^2/(k-2)}{(1-R^2)/(n-k+1)} \\
 &= \frac{0,358 / 3}{0,642 / 8} \\
 &= 0,1194 / 0,08 \\
 &= 1,4925
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X3 terhadap X1, X2 dan X4, maka didapatkan nilai F kritis sebesar 1,48532 sedangkan F hitungnya sebesar 1,4925. Sehingga F hitung < F kritis (1,48532 < 1,4925, berarti tidak terdapat multikolinearitas dalam data).

$$\begin{aligned}
 F \text{ kritis} &= \frac{R^2/(k-2)}{(1-R^2)/(n-k+1)} \\
 &= \frac{0,25588 / 3}{0,74412 / 8} \\
 &= 0,0853 / 0,0930 \\
 &= 0,9172043
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X4 terhadap X1, X2 dan X3, maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0,9172043 sedangkan F hitungnya sebesar 0,91699. Sehingga F hitung < F kritis (0,91699 < 0,9172043, berarti tidak terdapat multikolinearitas dalam data).

5.2.2. Kodia Yogyakarta

1. Koefisien Determinasi

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,975 atau sekitar 97% variasi dalam variabel tidak bebas dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas. Sedangkan sisanya 3% dijelaskan variabel-variabel lain yang tidak masuk dalam model. Sedangkan Adjusted R^2 (Koefisien Determinasi yang disesuaikan) menunjukkan angka 0,921 artinya setelah diperhitungkan dengan derajat kebebasannya ternyata model masih tetap baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas yaitu sebesar 92,1%.

2. Uji Signifikansi Keseluruhan

Hipotesis yang diajukan:

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 \neq 0$$

H_0 diartikan bahwa jumlah penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta tidak mempunyai hubungan linier dengan jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana prasarana pembangunan serta PDRB per Kapita atau seluruh variabel independen tidak mampu menerangkan variabel dependen.

Berdasarkan nilai F-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,000 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, dengan demikian hipotesis 0 ditolak, yang berarti seluruh

independen variabel secara bersama-sama mampu menerangkan dependen variabel secara baik.

3. Pengujian Koefisien Regresi

a. Jumlah surat penagihan

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

H_0 berarti jumlah surat penagihan tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta, sedangkan H_1 diartikan sebaliknya, yaitu jumlah surat penagihan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,009 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel jumlah surat penagihan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah surat penagihan yang dikeluarkan, maka penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta akan semakin meningkat.

b. Jumlah Wajib Pajak

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \beta_2 \neq 0$$

H₀ berarti jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta, sedangkan H₁ diartikan sebaliknya, yaitu jumlah wajib pajak berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,001 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel jumlah wajib pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta. Hal ini berarti semakin banyak jumlah wajib pajak, maka penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta akan semakin meningkat.

c. Dana Pembangunan Prasarana

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_1 : \beta_3 \neq 0$$

H₀ berarti dana pembangunan prasarana tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta, sedangkan H₁ diartikan sebaliknya, yaitu

dana pembangunan prasarana berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,012 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel dana pembangunan prasarana secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta. Hal ini berarti semakin besar dana pembangunan prasarana, maka penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta akan semakin meningkat.

d. PDRB per Kapita

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_1 : \beta_4 \neq 0$$

H₀ berarti PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta, sedangkan H₁ diartikan sebaliknya, yaitu PDRB per kapita berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,023 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa

variabel pendapatan perkapita secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta. Hal ini berarti semakin besar PDRB per kapita, maka penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta akan semakin meningkat.

4. Pengujian Secara Ekonometrik

Setelah pengujian secara statistik di atas, kemudian dilakukan pengujian secara umum untuk menguji penyimpangan terhadap asumsi klasik atas autokorelasi dan multikolinearitas.

a. Uji terhadap Gejala Autokorelasi

Hipotesis untuk autokorelasi :

H_0 : tidak ada autokorelasi

H_1 : ada autokorelasi

Menentukan kriteria pengujian :

1) Untuk autokorelasi positif

- H_0 diterima, jika $d > d_u$
- H_0 ditolak, jika $d < d_l$
- Tidak ada kesimpulan, jika $d_l < d < d_u$

(karena $d = 2,265$, sedangkan $d_l = 0,57$ dan $d_u = 1,85$, jadi H_0 diterima)

2) Untuk autokorelasi negatif

- H_0 diterima, jika $(4 - d) > d_u$

- Ho ditolak, jika $(4 - d) < dl$
- Tidak ada kesimpulan, jika $dl < (4 - d) < du$

(karena $d = 2,265$, sedangkan $dl = 0,57$ dan $du = 1,85$, $4 - d = 1,49813$, jadi Ho tidak ada kesimpulan)

Dengan demikian H_0 diterima, hal ini berarti tidak ada gejala autokorelasi dalam persamaan regresi linier berganda di atas.

b. Uji terhadap Gejala Multikolinearitas

Analisis multikolinearitas adalah, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 F \text{ kritis} &= \frac{R^2 / (k-2)}{(1-R^2) / (n-k+1)} \\
 &= \frac{0,125 / 3}{0,875 / 8} \\
 &= 0,042 / 0,109 \\
 &= 0,385321
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X_1 terhadap X_2 , X_3 dan X_4 , maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0,385321, sedangkan F hitungnya sebesar 0,37937. Sehingga F hitung $<$ F kritis ($0,37937 < 0,385321$) berarti tidak ada multikolinearitas dalam data).

$$\begin{aligned}
 F \text{ kritis} &= \frac{R^2 / (k-2)}{(1-R^2) / (n-k+1)} \\
 &= \frac{0,272 / 3}{0,728 / 8}
 \end{aligned}$$

$$= 0.091 / 0.091$$

$$= 1$$

Dengan meregresi X2 terhadap X1, X3 dan X4 maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0.99404; sedangkan F hitungnya sebesar 1. Sehingga F hitung < F kritis (0,99404 < 1), berarti tidak ada multikolinearitas dalam data).

$$\begin{aligned} F \text{ kritis} &= \frac{R^2/(k-2)}{(1-R^2)/(n-k+1)} \\ &= \frac{0,358 / 3}{0.642 / 8} \\ &= 0.1194 / 0.08 \\ &= 1.4925 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X3 terhadap X1, X2 dan X4, maka didapatkan nilai F kritis sebesar 1,48532 sedangkan F hitungnya sebesar 1,4925. Sehingga F hitung < F kritis (1,48532 < 1,4925, berarti tidak terdapat multikolinearitas dalam data).

$$\begin{aligned} F \text{ kritis} &= \frac{R^2/(k-2)}{(1-R^2)/(n-k+1)} \\ &= \frac{0,25588 / 3}{0.74412 / 8} \\ &= 0.0853 / 0.0930 \\ &= 0.9172043 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X4 terhadap X1, X2 dan X3, maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0,9172043 sedangkan F hitungnya sebesar 0,91699. Sehingga F hitung < F kritis ($0,91699 < 0,9172043$, berarti tidak terdapat multikolinearitas dalam data).

5.2.3. Kabupaten Kulonprogo

1. Koefisien Determinasi

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,960 atau sekitar 96% variasi dalam variabel tidak bebas dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas. Sedangkan sisanya 4% dijelaskan variabel-variabel lain yang tidak masuk dalam model. Sedangkan Adjusted R^2 (Koefisien Determinasi yang disesuaikan) menunjukkan angka 0,938 artinya setelah diperhitungkan dengan derajat kebebasannya ternyata model masih tetap baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas yaitu sebesar 93,8%.

2. Uji Signifikansi Keseluruhan

Hipotesis yang diajukan:

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 \neq 0$$

H_0 diartikan bahwa jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo tidak mempunyai hubungan linier dengan jumlah surat penagihan, jumlah wajib

pajak, dana prasarana pembangunan serta PDRB per kapita atau seluruh variabel independen tidak mampu menerangkan variabel dependen.

Berdasarkan nilai F-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,000 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, dengan demikian hipotesis 0 ditolak, yang berarti seluruh independen variabel secara bersama-sama mampu menerangkan dependen variabel secara baik.

3. Pengujian Koefisien Regresi

a. Jumlah surat penagihan

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

H_0 berarti jumlah surat penagihan tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo, sedangkan H_1 diartikan sebaliknya, yaitu jumlah surat penagihan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,010 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel jumlah surat penagihan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah surat penagihan yang dikeluarkan, maka penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo akan semakin meningkat.

b. Jumlah Wajib Pajak

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \beta_2 \neq 0$$

H_0 berarti jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo, sedangkan H_1 diartikan sebaliknya, yaitu jumlah wajib pajak berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,003 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel jumlah wajib pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo. Hal ini berarti semakin banyak jumlah wajib pajak, maka penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo akan semakin meningkat.

c. Dana Pembangunan Prasarana

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_1 : \beta_3 \neq 0$$

H₀ berarti dana pembangunan prasarana tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo, sedangkan H₁ diartikan sebaliknya, yaitu dana pembangunan prasarana berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,004 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel dana pembangunan prasarana secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo. Hal ini berarti semakin besar dana pembangunan prasarana, maka penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo akan semakin meningkat.

d. PDRB per kapita

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_1 : \beta_4 \neq 0$$

H0 berarti PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo, sedangkan H1 diartikan sebaliknya, yaitu PDRB per kapita berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,009 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel PDRB perkapita secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo. Hal ini berarti semakin besar PDRB per kapita, maka penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo akan semakin meningkat.

4. Pengujian Secara Ekonometrik

Setelah pengujian secara statistik di atas, kemudian dilakukan pengujian secara umum untuk menguji penyimpangan terhadap asumsi klasik atas autokorelasi dan multikolinearitas.

a. Uji terhadap Gejala Autokorelasi

Hipotesis untuk autokorelasi :

H0 : tidak ada autokorelasi

H1 : ada autokorelasi

Menentukan kriteria pengujian :

1) Untuk autokorelasi positif

- Ho diterima, jika $d > du$
- Ho ditolak, jika $d < dl$
- Tidak ada kesimpulan, jika $dl < d < du$

(karena $d = 2,363$, sedangkan $dl = 0,57$ dan $du = 1,85$, jadi Ho diterima)

2) Untuk autokorelasi negatif

- Ho diterima, jika $(4 - d) > du$
- Ho ditolak, jika $(4 - d) < dl$
- Tidak ada kesimpulan, jika $dl < (4 - d) < du$

(karena $d = 2,363$, sedangkan $dl = 0,57$ dan $du = 1,85$, $4 - d = 1,49813$, jadi Ho tidak ada kesimpulan)

Dengan demikian H_0 diterima, hal ini berarti tidak ada gejala autokorelasi dalam persamaan regresi linier berganda di atas.

b. Uji terhadap Gejala Multikolinearitas

Analisis multikolinearitas dapat dideteksi dengan meregresi tiap X_i atas sisa X dengan menghitung R^2 yang cocok, yang bias disebut R_i^2 , sebagai berikut:

$$F \text{ kritis} = \frac{R^2 / (k-2)}{(1-R^2) / (n-k+1)}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{0,125 / 3}{0,875 / 8} \\
 &= 0,042 / 0,109 \\
 &= 0,385321
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X1 terhadap X2, X3 dan X4, maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0,385321, sedangkan F hitungnya sebesar 0,37937. Sehingga F hitung < F kritis (0,37937 < 0,385321) berarti tidak ada multikolinearitas dalam data).

$$\begin{aligned}
 \text{F kritis} &= \frac{R^2/(k-2)}{(1-R^2)/(n-k+1)} \\
 &= \frac{0,272 / 3}{0,728 / 8} \\
 &= 0,091 / 0,091 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X2 terhadap X1, X3 dan X4 maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0,99404; sedangkan F hitungnya sebesar 1. Sehingga F hitung < F kritis (0,99404 < 1), berarti tidak ada multikolinearitas dalam data).

$$\begin{aligned}
 \text{F kritis} &= \frac{R^2/(k-2)}{(1-R^2)/(n-k+1)} \\
 &= \frac{0,358 / 3}{0,642 / 8} \\
 &= 0,1194 / 0,08 \\
 &= 1,4925
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X3 terhadap X1, X2 dan X4, maka didapatkan nilai F kritis sebesar 1,48532 sedangkan F hitungnya sebesar 1,4925. Sehingga F hitung < F kritis ($1,48532 < 1,4925$, berarti tidak terdapat multikolinearitas dalam data).

$$\begin{aligned} F \text{ kritis} &= \frac{R^2/(k-2)}{(1-R^2)/(n-k+1)} \\ &= \frac{0,25588 / 3}{0,74412 / 8} \\ &= 0,0853 / 0,0930 \\ &= 0,9172043 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X4 terhadap X1, X2 dan X3, maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0,9172043 sedangkan F hitungnya sebesar 0,91699. Sehingga F hitung < F kritis ($0,91699 < 0,9172043$, berarti tidak terdapat multikolinearitas dalam data).

5.2.4. Kabupaten Bantul

1. Koefisien Determinasi

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,930 atau sekitar 93% variasi dalam variabel tidak bebas dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas. Sedangkan sisanya 3% dijelaskan variabel-variabel lain yang tidak masuk dalam model. Sedangkan Adjusted R^2 (Koefisien Determinasi yang disesuaikan) menunjukkan angka 0,891 artinya setelah diperhitungkan dengan derajat kebebasannya ternyata

model masih tetap baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas yaitu sebesar 89,1%.

2. Uji Signifikansi Keseluruhan

Hipotesis yang diajukan:

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 \neq 0$$

H_0 diartikan bahwa jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Bantul tidak mempunyai hubungan linier dengan jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana prasarana pembangunan serta PDRB per kapita atau seluruh variabel independen tidak mampu menerangkan variabel dependen.

Berdasarkan nilai F-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,000 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, dengan demikian hipotesis 0 ditolak, yang berarti seluruh independen variabel secara bersama-sama mampu menerangkan dependen variabel secara baik.

3. Pengujian Koefisien Regresi

a. Jumlah surat penagihan

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

H₀ berarti jumlah surat penagihan tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Bantul sedangkan H₁ diartikan sebaliknya, yaitu jumlah surat penagihan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,027 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel jumlah surat penagihan secara statistik berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Bantul. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah surat penagihan yang dikeluarkan, maka penerimaan PBB di Kabupaten Bantul akan semakin meningkat.

b. Jumlah Wajib Pajak

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \beta_2 \neq 0$$

H₀ berarti jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Bantul, sedangkan H₁ diartikan sebaliknya, yaitu

jumlah wajib pajak berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,013 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel jumlah wajib pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Bantul. Hal ini berarti semakin banyak jumlah wajib pajak, maka penerimaan PBB di Kabupaten Bantul akan semakin meningkat.

c. Dana Pembangunan Prasarana

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_1 : \beta_3 \neq 0$$

H₀ berarti dana pembangunan prasarana tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Bantul, sedangkan H₁ diartikan sebaliknya, yaitu dana pembangunan prasarana berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,040 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel dana pembangunan prasarana secara statistik berpengaruh signifikan

terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Bantul. Hal ini berarti semakin besar dana pembangunan prasarana, maka penerimaan PBB di Kabupaten Bantul akan semakin meningkat.

d. PDRB per kapita

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_1 : \beta_4 \neq 0$$

H₀ berarti PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Bantul, sedangkan H₁ diartikan sebaliknya, yaitu PDRB per kapita berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,026 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel PDRB per kapita secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Bantul. Hal ini berarti semakin besar PDRB per kapita, maka penerimaan PBB di Kabupaten Bantul akan semakin meningkat.

4. Pengujian Secara Ekonometrik

1. Uji terhadap Gejala Autokorelasi

Hipotesis untuk autokorelasi :

H_0 : tidak ada autokorelasi

H_1 : ada autokorelasi

Menentukan kriteria pengujian :

1) Untuk autokorelasi positif

- H_0 diterima, jika $d > d_u$
- H_0 ditolak, jika $d < d_l$
- Tidak ada kesimpulan, jika $d_l < d < d_u$

(karena $d = 2,633$, sedangkan $d_l = 0,57$ dan $d_u = 1,85$, jadi H_0 diterima)

2) Untuk autokorelasi negatif

- H_0 diterima, jika $(4 - d) > d_u$
- H_0 ditolak, jika $(4 - d) < d_l$
- Tidak ada kesimpulan, jika $d_l < (4 - d) < d_u$

(karena $d = 2,633$, sedangkan $d_l = 0,57$ dan $d_u = 1,85$, $4 - d = 1,49813$, jadi

H_0 tidak ada kesimpulan)

Dengan demikian H_0 diterima, hal ini berarti tidak ada gejala autokorelasi dalam persamaan regresi linier berganda di atas.

b. Uji terhadap Gejala Multikolinearitas

Analisis multikolinearitas dapat dideteksi dengan meregresi tiap X_i atas sisa X dengan menghitung R^2 yang cocok, yang bias disebut R_i^2 , sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 F \text{ kritis} &= \frac{R^2 / (k-2)}{(1-R^2) / (n-k+1)} \\
 &= \frac{0,125 / 3}{0,875 / 8} \\
 &= 0,042 / 0,109 \\
 &= 0,385321
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X_1 terhadap X_2 , X_3 dan X_4 , maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0,385321, sedangkan F hitungnya sebesar 0,37937. Sehingga F hitung < F kritis ($0,37937 < 0,385321$) berarti tidak ada multikolinearitas dalam data).

$$\begin{aligned}
 F \text{ kritis} &= \frac{R^2 / (k-2)}{(1-R^2) / (n-k+1)} \\
 &= \frac{0,272 / 3}{0,728 / 8} \\
 &= 0,091 / 0,091 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X_2 terhadap X_1 , X_3 dan X_4 maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0,99404; sedangkan F hitungnya sebesar 1. Sehingga F hitung < F kritis ($0,99404 < 1$), berarti tidak ada multikolinearitas dalam data).

$$\begin{aligned}
 F \text{ kritis} &= \frac{R^2/(k-2)}{(1-R^2)/(n-k+1)} \\
 &= \frac{0,358 / 3}{0,642 / 8} \\
 &= 0,1194 / 0,08 \\
 &= 1,4925
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X3 terhadap X1, X2 dan X4, maka didapatkan nilai F kritis sebesar 1,48532 sedangkan F hitungnya sebesar 1,4925. Sehingga F hitung < F kritis (1,48532 < 1,4925, berarti tidak terdapat multikolinieritas dalam data).

$$\begin{aligned}
 F \text{ kritis} &= \frac{R^2/(k-2)}{(1-R^2)/(n-k+1)} \\
 &= \frac{0,25588 / 3}{0,74412 / 8} \\
 &= 0,0853 / 0,0930 \\
 &= 0,9172043
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X4 terhadap X1, X2 dan X3, maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0,9172043 sedangkan F hitungnya sebesar 0,91699. Sehingga F hitung < F kritis (0,91699 < 0,9172043, berarti tidak terdapat multikolinieritas dalam data).

5.2.5. Kabupaten Gunungkidul

1. Koefisien Determinasi

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,962 atau sekitar 96% variasi dalam variabel tidak bebas dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas. Sedangkan sisanya 4% dijelaskan variabel-variabel lain yang tidak masuk dalam model. Sedangkan Adjusted R^2 (Koefisien Determinasi yang disesuaikan) menunjukkan angka 0,940 artinya setelah diperhitungkan dengan derajat kebebasannya ternyata model masih tetap baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas yaitu sebesar 94%.

2. Uji Signifikansi Keseluruhan

Hipotesis yang diajukan:

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 \neq 0$$

H_0 diartikan bahwa jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul tidak mempunyai hubungan linier dengan jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana prasarana pembangunan serta PDRB per kapita atau seluruh variabel independen tidak mampu menerangkan variabel dependen.

Berdasarkan nilai F-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,000 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, dengan demikian hipotesis 0 ditolak, yang berarti seluruh

independen variabel secara bersama-sama mampu menerangkan dependen variabel secara baik.

3. Pengujian Koefisien Regresi

a. Jumlah surat penagihan

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

H_0 berarti jumlah surat penagihan tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul sedangkan H_1 diartikan sebaliknya, yaitu jumlah surat penagihan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,0004 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel jumlah surat penagihan secara statistik berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah surat penagihan yang dikeluarkan, maka penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul; akan semakin meningkat.

b. Jumlah Wajib Pajak

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \beta_2 \neq 0$$

H₀ berarti jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul, sedangkan H₁ diartikan sebaliknya, yaitu jumlah wajib pajak berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,0055 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel jumlah wajib pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini berarti semakin banyak jumlah wajib pajak, maka penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul akan semakin meningkat.

c. Dana Pembangunan Prasarana

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_1 : \beta_3 \neq 0$$

H0 berarti dana pembangunan prasarana tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul, sedangkan H1 diartikan sebaliknya, yaitu dana pembangunan prasarana berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,0497 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel dana pembangunan prasarana secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini berarti semakin tinggi besar dana pembangunan prasarana, maka penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul akan semakin meningkat.

d. PDRB per kapita

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_1 : \beta_4 \neq 0$$

H0 berarti PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul, sedangkan H1 diartikan sebaliknya, yaitu PDRB per kapita berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,0122 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel PDRB per kapita secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini berarti semakin besar PDRB per kapita, maka penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul akan semakin meningkat.

4. Pengujian Secara Ekonometrik

1. Uji terhadap Gejala Autokorelasi

Hipotesis untuk autokorelasi :

H0 : tidak ada autokorelasi

H1 : ada autokorelasi

Menentukan kriteria pengujian :

1) Untuk autokorelasi positif

- Ho diterima, jika $d > d_u$
- Ho ditolak, jika $d < d_l$
- Tidak ada kesimpulan, jika $d_l < d < d_u$

(karena $d = 2,728$, sedangkan $d_l = 0,57$ dan $d_u = 1,85$, jadi Ho diterima)

2) Untuk autokorelasi negatif

- Ho diterima, jika $(4 - d) > d_u$

- Ho ditolak, jika $(4 - d) < dl$
- Tidak ada kesimpulan, jika $dl < (4 - d) < du$

(karena $d = 2,728$, sedangkan $dl = 0,57$ dan $du = 1,85$, $4 - d = 1,49813$, jadi

Ho tidak ada kesimpulan)

Dengan demikian H_0 diterima, hal ini berarti tidak ada gejala autokorelasi dalam persamaan regresi linier berganda di atas.

b. Uji terhadap Gejala Multikolinearitas

Analisis multikolinearitas dapat dideteksi dengan meregresi tiap X_i atas sisa X dengan menghitung R^2 yang cocok, yang bias disebut R_i^2 , sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 F \text{ kritis} &= \frac{R^2 / (k-2)}{(1-R^2) / (n-k+1)} \\
 &= \frac{0,125 / 3}{0,875 / 8} \\
 &= 0,042 / 0,109 \\
 &= 0,385321
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X_1 terhadap X_2 , X_3 dan X_4 , maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0,385321, sedangkan F hitungnya sebesar 0,37937. Sehingga F hitung $<$ F kritis ($0,37937 < 0,385321$) berarti tidak ada multikolinearitas dalam data).

$$F \text{ kritis} = \frac{R^2 / (k-2)}{(1-R^2) / (n-k+1)}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{0,272 / 3}{0,728 / 8} \\
 &= 0,091 / 0,091 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X2 terhadap X1, X3 dan X4 maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0,99404; sedangkan F hitungnya sebesar 1. Sehingga F hitung < F kritis (0,99404 < 1), berarti tidak ada multikolinearitas dalam data).

$$\begin{aligned}
 \text{F kritis} &= \frac{R^2 / (k-2)}{(1-R^2) / (n-k+1)} \\
 &= \frac{0,358 / 3}{0,642 / 8} \\
 &= 0,1194 / 0,08 \\
 &= 1,4925
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X3 terhadap X1, X2 dan X4, maka didapatkan nilai F kritis sebesar 1,48532 sedangkan F hitungnya sebesar 1,4925. Sehingga F hitung < F kritis (1,48532 < 1,4925, berarti tidak terdapat multikolinearitas dalam data).

$$\begin{aligned}
 \text{F kritis} &= \frac{R^2 / (k-2)}{(1-R^2) / (n-k+1)} \\
 &= \frac{0,25588 / 3}{0,74412 / 8} \\
 &= 0,0853 / 0,0930 \\
 &= 0,9172043
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X4 terhadap X1, X2 dan X3, maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0,9172043 sedangkan F hitungnya sebesar 0,91699. Sehingga F hitung < F kritis ($0,91699 < 0,9172043$, berarti tidak terdapat multikolinearitas dalam data).

5.2.6. Kabupaten Sleman

1. Koefisien Determinasi

Nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,960 atau sekitar 96% variasi dalam variabel tidak bebas dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas. Sedangkan sisanya 4% dijelaskan variabel-variabel lain yang tidak masuk dalam model. Sedangkan Adjusted R^2 (Koefisien Determinasi yang disesuaikan) menunjukkan angka 0,937 artinya setelah diperhitungkan dengan derajat kebebasannya ternyata model masih tetap baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas yaitu sebesar 93,7%.

2. Uji Signifikansi Keseluruhan

Hipotesis yang diajukan:

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 \neq 0$$

H_0 diartikan bahwa jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Sleman tidak mempunyai hubungan linier dengan jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak,

dana prasarana pembangunan serta PDRB per kapita atau seluruh variabel independen tidak mampu menerangkan variabel dependen.

Berdasarkan nilai F-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,000 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, dengan demikian hipotesis 0 ditolak, yang berarti seluruh independen variabel secara bersama-sama mampu menerangkan dependen variabel secara baik.

3. Pengujian Koefisien Regresi

a. Jumlah surat penagihan

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

H₀ berarti jumlah surat penagihan tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Sleman sedangkan H₁ diartikan sebaliknya, yaitu jumlah surat penagihan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,000 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel jumlah surat penagihan secara statistik berpengaruh secara signifikan

terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Sleman. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah surat penagihan yang dikeluarkan, maka penerimaan PBB di Kabupaten Sleman akan semakin meningkat.

b. Jumlah Wajib Pajak

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \beta_2 \neq 0$$

H_0 berarti jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Sleman, sedangkan H_1 diartikan sebaliknya, yaitu jumlah wajib pajak berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,026 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel jumlah wajib pajak secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Sleman. Hal ini berarti semakin banyak jumlah wajib pajak, maka penerimaan PBB di Kabupaten Sleman akan semakin meningkat.

c. Dana Pembangunan Prasarana

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_1 : \beta_3 \neq 0$$

H₀ berarti dana pembangunan prasarana tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Sleman, sedangkan H₁ diartikan sebaliknya, yaitu dana pembangunan prasarana berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,048 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel dana pembangunan prasarana secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Sleman. Hal ini berarti semakin besar dana pembangunan prasarana, maka penerimaan PBB di Kabupaten Sleman akan semakin meningkat.

d. PDRB per kapita

Hipotesis yang diajukan adalah :

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_1 : \beta_4 \neq 0$$

H₀ berarti PDRB per kapita tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PBB di Kabupaten Sleman, sedangkan H₁ diartikan sebaliknya, yaitu PDRB per

kapita berpengaruh dan penting secara statistik terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil regresi dengan program SPSS, diketahui tingkat signifikannya 0,042 yang berarti lebih rendah dari tingkat signifikan (α) = 5%, maka kita dapat menolak hipotesis 0 dan mengatakan bahwa variabel PDRB per kapita secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Sleman. Hal ini berarti semakin besar PDRB per kapita, maka penerimaan PBB di Kabupaten Sleman akan semakin meningkat.

4. Pengujian Secara Ekonometrik

1. Uji terhadap Gejala Autokorelasi

Hipotesis untuk autokorelasi :

H0 : tidak ada autokorelasi

H1 : ada autokorelasi

Menentukan kriteria pengujian :

1) Untuk autokorelasi positif

- Ho diterima, jika $d > d_u$
- Ho ditolak, jika $d < d_l$
- Tidak ada kesimpulan, jika $d_l < d < d_u$

(karena $d = 2,206$, sedangkan $d_l = 0,57$ dan $d_u = 1,85$, jadi Ho diterima)

2) Untuk autokorelasi negatif

- Ho diterima, jika $(4 - d) > du$
- Ho ditolak, jika $(4 - d) < dl$
- Tidak ada kesimpulan, jika $dl < (4 - d) < du$

(karena $d = 2,206$, sedangkan $dl = 0,57$ dan $du = 1,85$, $4 - d = 1,49813$, jadi

Ho tidak ada kesimpulan)

Dengan demikian H_0 diterima, hal ini berarti tidak ada gejala autokorelasi dalam persamaan regresi linier berganda di atas.

b. Uji terhadap Gejala Multikolinearitas

Analisis multikolinearitas dapat dideteksi dengan meregresi tiap X_i atas sisa X dengan menghitung R^2 yang cocok, yang biasa disebut R_i^2 , sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 F \text{ kritis} &= \frac{R^2 / (k-2)}{(1-R^2) / (n-k+1)} \\
 &= \frac{0,125 / 3}{0,875 / 8} \\
 &= 0,042 / 0,109 \\
 &= 0,385321
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X1 terhadap X2, X3 dan X4, maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0.385321, sedangkan F hitungnya sebesar 0,37937. Sehingga F hitung < F kritis (0,37937 < 0.385321) berarti tidak ada multikolinearitas dalam data).

$$\begin{aligned}
 F \text{ kritis} &= \frac{R^2/(k-2)}{(1-R^2)/(n-k+1)} \\
 &= \frac{0,272 / 3}{0.728 / 8} \\
 &= 0.091 / 0.091 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X2 terhadap X1, X3 dan X4 maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0.99404; sedangkan F hitungnya sebesar 1. Sehingga F hitung < F kritis (0,99404 < 1), berarti tidak ada multikolinearitas dalam data).

$$\begin{aligned}
 F \text{ kritis} &= \frac{R^2/(k-2)}{(1-R^2)/(n-k+1)} \\
 &= \frac{0,358 / 3}{0.642 / 8} \\
 &= 0.1194 / 0.08 \\
 &= 1.4925
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X3 terhadap X1, X2 dan X4, maka didapatkan nilai F kritis sebesar 1,48532 sedangkan F hitungnya sebesar 1,4925. Sehingga F hitung < F kritis (1,48532 < 1,4925, berarti tidak terdapat multikolinearitas dalam data).

$$\begin{aligned}
 F \text{ kritis} &= \frac{R^2/(k-2)}{(1-R^2)/(n-k+1)} \\
 &= \frac{0,25588 / 3}{0,74412 / 8} \\
 &= 0,0853 / 0,0930 \\
 &= 0,9172043
 \end{aligned}$$

Dengan meregresi X4 terhadap X1, X2 dan X3, maka didapatkan nilai F kritis sebesar 0,9172043 sedangkan F hitungnya sebesar 0,91699. Sehingga F hitung < F kritis (0,91699 < 0,9172043, berarti tidak terdapat multikolinearitas dalam data).

5.3. Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Penerimaan PBB di D.I. Yogyakarta

5.3.1. Jumlah surat penagihan

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan terlihat koefisien regresi dari variabel jumlah surat penagihan bertanda positif terhadap variabel penerimaan PBB di D.I. Yogyakarta. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Propinsi D.I. Yogyakarta

Koefisien regresi parsial dari variabel jumlah surat penagihan sebesar 149,044 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita), apabila jumlah surat penagihan naik sebanyak 1 lembar, maka penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta akan meningkat sebesar Rp 149.044,-.

2. Kodia Yogyakarta

Koefisien regresi parsial dari variabel jumlah surat penagihan sebesar 410,906 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita), apabila jumlah surat penagihan naik sebanyak 1 lembar, maka penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta akan meningkat sebesar Rp 410.906,-.

3. Kabupaten Kulonprogo

Koefisien regresi parsial dari variabel jumlah surat penagihan sebesar 37,349 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita), apabila jumlah surat penagihan naik sebanyak 1 lembar, maka penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo akan meningkat sebesar Rp 37.349,-.

4. Kabupaten Bantul

Koefisien regresi parsial dari variabel jumlah surat penagihan sebesar 30,394 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita), apabila jumlah surat penagihan naik sebanyak 1 lembar, maka penerimaan PBB di Kabupaten Bantul akan meningkat sebesar Rp 30.394,-.

5. Kabupaten Gunungkidul

Koefisien regresi parsial dari variabel jumlah surat penagihan sebesar 29,834 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah

wajib pajak, dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita), apabila jumlah surat penagihan naik sebanyak 1 lembar, maka penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul akan meningkat sebesar Rp 29.834,-.

6. Kabupaten Sleman

Koefisien regresi parsial dari variabel jumlah surat penagihan sebesar 317,434 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita), apabila jumlah surat penagihan naik sebanyak 1 lembar, maka penerimaan PBB di Kabupaten Sleman akan meningkat sebesar Rp 317.434,-.

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui jumlah surat penagihan yang memberikan pengaruh yang paling tinggi terhadap penerimaan PBB, dari setiap kenaikan 1 lembar surat penagihan adalah Kodia Yogyakarta (Rp 410.906,-) dan Kabupaten Sleman (Rp 317.434,-).

Kenaikan penerimaan pajak PBB disebabkan karena jumlah surat penagihan mengalami kenaikan, hal ini dapat terjadi karena kapasitas administrasi sudah semakin baik dengan diterapkannya sistem SISTEP dan Kolektor. Hal ini sesuai dengan pendapat Zandjani (1992) bahwa kapasitas administrasi perpajakan jelas mempengaruhi kemampuan pemungutan pajak, maupun pendapat Todaro (1994) bahwa potensi perpajakan dengan administrasi perpajakan berkaitan sangat erat, administrasi yang efisien yang terdiri dari orang-orang yang integritasnya tinggi

merupakan syarat terpenting untuk mencapai penghasilan maksimum, dan menggali potensi perpajakan suatu negara

Kenaikan surat penagihan tidak secara proporsional menaikkan penerimaan PBB, hal ini disebabkan nilai nominal dari setiap surat penagihan berbeda. Selain itu surat penagihan tidak selalu efektif untuk menagih tunggakan pajak dari WP, selain karena adanya keberatan dari WP atas besarnya PBB, juga dapat disebabkan oleh ketidaksadaran WP dalam membayar PBB. Oleh sebab itu kapasitas administrasi dapat semakin efektif apabila kesadaran masyarakat dalam membayar PBB sehingga tunggakan PBB menjadi semakin tinggi.

5.3.2. Jumlah Wajib Pajak

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan terlihat koefisien regresi dari variabel jumlah wajib pajak bertanda positif terhadap variabel penerimaan PBB di D.I. Yogyakarta. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Propinsi D.I. Yogyakarta

Koefisien regresi parsial dari variabel jumlah wajib pajak sebesar 23,553 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita), apabila jumlah wajib pajak naik sebanyak 1 orang, maka penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta akan meningkat sebesar Rp 23.553,-.

2. Kodia Yogyakarta

Koefisien regresi parsial dari variabel jumlah wajib pajak sebesar 134,647 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita), apabila jumlah wajib pajak naik sebanyak 1 orang, maka penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta akan meningkat sebesar Rp 134.647,-.

3. Kabupaten Kulonprogo

Koefisien regresi parsial dari variabel jumlah wajib pajak sebesar 9,092 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita), apabila jumlah wajib pajak naik sebanyak 1 orang, maka penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo akan meningkat sebesar Rp 9.092,-.

4. Kabupaten Bantul

Koefisien regresi parsial dari variabel jumlah wajib pajak sebesar 7,839 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita), apabila jumlah wajib pajak naik sebanyak 1 orang, maka penerimaan PBB di Kabupaten Bantul akan meningkat sebesar Rp 7.839,-.

5. Kabupaten Gunungkidul

Koefisien regresi parsial dari variabel jumlah wajib pajak sebesar 4,486 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah

surat penagihan, dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita), apabila jumlah wajib pajak naik sebanyak 1 orang, maka penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul akan meningkat sebesar Rp 4.486,-.

6. Kabupaten Sleman

Koefisien regresi parsial dari variabel jumlah wajib pajak sebesar 27,006 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita), apabila jumlah wajib pajak naik sebanyak 1 orang, maka penerimaan PBB di Kabupaten Sleman akan meningkat sebesar Rp 27.006,-.

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui jumlah wajib pajak yang memberikan pengaruh yang paling tinggi terhadap penerimaan PBB, dari setiap kenaikan 1 orang wajib pajak adalah Kodia Yogyakarta (Rp 134.647,-) dan Kabupaten Sleman (Rp 27.006,-).

Pengaruh jumlah wajib pajak tersebut dibandingkan dengan pengaruh jumlah surat penagihan terhadap penerimaan PBB lebih rendah dikarenakan besarnya tunggakan PBB setiap kali yang berhasil ditagih nominalnya akan lebih besar, yaitu akumulasi hutang PBB yang belum dibayarkan sampai dengan munculnya surat penagihan.

Kenaikan penerimaan pajak PBB disebabkan karena jumlah wajib pajak mengalami kenaikan, karena pembayar PBB akan semakin meningkat pula.

Pemungutan PBB tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari pihak masyarakat, baik jumlah dan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kenaikan jumlah wajib pajak yang tidak diikuti dengan kenaikan penerimaan PBB, selain rendahnya tingkat kesadaran/ kepatuhan membayar pajak juga dapat disebabkan subyek PBB belum tentu merupakan WP PBB. Hal ini karena yang didaftarkan oleh orang atau badan sebagai subyek pajak adalah: pertama, semua tanah yang dimiliki dengan suatu hak dan /atau dimanfaatkan. Kedua, semua bangunan yang dimiliki dan /atau dikuasai serta dapat dimanfaatkan.

Sesuai UU No. 12 tahun 1985 Pasal 4 adalah subyek pajak adalah setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak sebagaimana diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 dan memperoleh manfaat atas bumi dan/ atau bangunan dapat dikenakan pajak bumi dan bangunan, sekalipun orang atau badan tersebut menyewa atau hanya sekedar numpang. Rochmat Soemitro (1989) menyatakan bahwa “asas manfaat” tersebut yang membayar PBB adalah orang memperoleh manfaat atas bumi dan/ atau bangunan yang dinikmatinya.

Kadang-kadang penyewa atau yang hanya sekedar numpang tidak memiliki kesadaran/ kepatuhan membayar pajak. Hal ini berarti jumlah WP yang ada sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, keaktifan petugas pajak dalam memberikan penyuluhan pajak serta adanya *law enforcement* terhadap pelanggaran UU Perpajakan.

5.3.3. Dana Pembangunan Prasarana

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan terlihat koefisien regresi dari variabel dana pembangunan prasarana bertanda positif terhadap variabel penerimaan PBB di D.I. Yogyakarta. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Propinsi D.I. Yogyakarta

Koefisien regresi parsial dari variabel dana pembangunan prasarana sebesar 0,01848 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak dan PDRB per kapita), apabila dana pembangunan prasarana naik sebanyak Rp 1.000,-, maka penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta akan meningkat sebesar Rp 18.480,-

2. Kodia Yogyakarta

Koefisien regresi parsial dari variabel dana pembangunan prasarana sebesar 0,05733 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak dan PDRB per kapita), apabila dana pembangunan prasarana naik sebanyak Rp 1.000,-, maka penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta akan meningkat sebesar Rp 57.330,-.

3. Kabupaten Kulonprogo

Koefisien regresi parsial dari variabel dana pembangunan prasarana sebesar 0,007182 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak dan PDRB per kapita),

apabila dana pembangunan prasarana naik sebanyak Rp 1.000,-, maka penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo akan meningkat sebesar Rp 7.182,-.

4. Kabupaten Bantul

Koefisien regresi parsial dari variabel dana pembangunan prasarana sebesar 0,008496 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak dan PDRB per kapita), apabila dana pembangunan prasarana naik sebanyak Rp 1.000,-, maka penerimaan PBB di Kabupaten Bantul akan meningkat sebesar Rp 8.496,-.

5. Kabupaten Gunungkidul

Koefisien regresi parsial dari variabel dana pembangunan prasarana sebesar 0,003652 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak dan PDRB per kapita), apabila dana pembangunan prasarana naik sebanyak Rp 1.000,-, maka penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul akan meningkat sebesar Rp 3.652,-.

6. Kabupaten Sleman

Koefisien regresi parsial dari variabel dana pembangunan prasarana sebesar 0,024 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak dan PDRB per kapita), apabila dana pembangunan prasarana naik sebanyak Rp 1.000,-, maka penerimaan PBB di Kabupaten Sleman akan meningkat sebesar Rp 24.000,-.

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui dana pembangunan prasarana yang memberikan pengaruh yang paling tinggi terhadap penerimaan PBB, dari setiap kenaikan dana pembangunan prasarana adalah Kota Yogyakarta (Rp 53.330,-) dan Kabupaten Sleman (Rp 24.000,-). Pembangunan prasarana di kedua Dati II tersebut lebih tinggi dalam meningkatkan nilai jual tanah dan/ atau bangunan (objek pajak), sehingga penerimaan PBB-nya juga lebih tinggi.

Pengaruh tersebut semakin mendukung teori yang menyatakan bahwa perkembangan pembangunan yang di wilayah setempat akan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak, atau yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai objek pajak, pada akhirnya menjadi objek pajak PBB. Realisasi dana pembangunan prasarana daerah menunjukkan tingkat fasilitas yang sudah dibangun yang dapat mendukung dan meningkatkan kelas obyek pajak khususnya kelas bumi serta dapat meningkatkan NJOP secara langsung.

Kenaikan dana pembangunan prasarana juga tidak semata-mata langsung meningkatkan penerimaan PBB, karena apabila petugas PBB tidak selalu memantau perkembangan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi dan/ atau bangunan yang ada maka walaupun di lapangan NJOP-nya sudah naik, tetapi belum terpantau oleh KP-PBB setempat maka penerimaannya masih tetap seperti pada tahun sebelumnya.

5.3.4. PDRB per kapita

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan terlihat koefisien regresi dari variabel PDRB per kapita bertanda positif terhadap variabel penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Propinsi D.I. Yogyakarta

Koefisien regresi parsial dari variabel PDRB per kapita sebesar 7,388 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak dan dana pembangunan prasarana), apabila PDRB per kapita naik sebanyak Rp 1,-, maka penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta akan meningkat sebesar Rp 7.388.-.

2. Kodia Yogyakarta

Koefisien regresi parsial dari variabel dana pembangunan prasarana sebesar 1,376 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak dan dana pembangunan prasarana), apabila PDRB per kapita naik sebanyak Rp 1,-, maka penerimaan PBB di Kodia Yogyakarta akan meningkat sebesar Rp 1.376,-.

3. Kabupaten Kulonprogo

Koefisien regresi parsial dari variabel dana pembangunan prasarana sebesar 0,146 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak dan dana pembangunan prasarana),

apabila PDRB per kapita naik sebanyak Rp 1,-, maka penerimaan PBB di Kabupaten Kulonprogo akan meningkat sebesar Rp 146,-.

4. Kabupaten Bantul

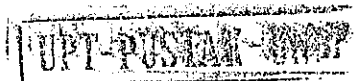
Koefisien regresi parsial dari variabel PDRB per kapita sebesar 0,605 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak dan dana pembangunan prasarana), apabila PDRB per kapita naik sebanyak Rp 1,-, maka penerimaan PBB di Kabupaten Bantul akan meningkat sebesar Rp 605,-.

5. Kabupaten Gunungkidul

Koefisien regresi parsial dari variabel PDRB per kapita sebesar 0,251 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak dan dana pembangunan prasarana), apabila PDRB per kapita naik sebanyak Rp 1,-, maka penerimaan PBB di Kabupaten Gunungkidul akan meningkat sebesar Rp 251,-.

6. Kabupaten Sleman

Koefisien regresi parsial dari variabel PDRB per kapita sebesar 1,631 ribu berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak dan dana pembangunan prasarana), apabila PDRB per kapita naik sebanyak Rp 1,-, maka penerimaan PBB di Kabupaten Sleman akan meningkat sebesar Rp 1.631,-.



Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui PDRB per kapita yang memberikan pengaruh yang paling tinggi terhadap penerimaan PBB, dari setiap kenaikan PDRB per kapita adalah Kabupaten Sleman (Rp 1.631,-) dan Kodia Yogyakarta (Rp 1.376,-).

Pendapatan masyarakat (tercermin dalam PDRB) yang terbukti mempengaruhi penerimaan PBB tersebut sesuai dengan Rochmat Soemitro (1989) bahwa pemilik tanah pada umumnya memiliki kemampuan membayar pajak yang tinggi, oleh karenanya pemilik tanah dapat dijadikan ukuran, meski agak kasar mengenai kemampuan membayar pajak. Pendapatan masyarakat menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk untuk membayar pajak. Pihak pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta perlu memikirkan untuk meningkatkan PDRB-nya sehingga PDRB per kapitanya juga dapat semakin meningkat.

5.4. Implementasi Strategis

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana prasarana pembangunan serta PDRB per kapita penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PBB di D.I. Yogyakarta. Oleh sebab itu apabila pemerintah daerah masing-masing, terutama KP-PBB ingin meningkatkan penerimaan PBB, maka perlu mengoptimalkakan jumlah surat

penagihan, jumlah wajib pajak, dana prasarana pembangunan serta PDRB per kapita penduduk.

Sesuai dengan karakteristik pengaruh faktor-faktor terhadap penerimaan PBB di masing-masing Daerah Tingkat II di D.I. Yogyakarta, maka implementasi strategisnya dapat diprioritaskan sebagai berikut:

1. Jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, jumlah dana dan prasarana, dan PDRB per kapita perlu mendapat prioritas peningkatan di Kodia Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Hal ini dapat terjadi mengingat semakin banyak jumlah surat penagihan dan jumlah wajib pajak semakin tinggi dalam meningkatkan penerimaan PBB di kedua Daerah Tingkat II tersebut. Kedua daerah tersebut merupakan wilayah yang relatif lebih ramai dan maju dibandingkan dengan Daerah Tingkat II lainnya di D.I. Yogyakarta, sehingga kapasitas administrasi di KP-PBB-nya juga lebih baik. Hal ini masih ditunjang oleh kemampuan membayar pajak yang lebih tinggi (memiliki PDRB per kapita yang tinggi), sehingga penerimaan PBB juga semakin meningkat. NJOP di wilayah tersebut juga relatif lebih tinggi, sehingga semakin banyak jumlah wajib pajak (dengan bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, yang nilainya juga tinggi) semakin meningkatkan penerimaan PBB. Meningkatnya pembangunan prasarana di kedua wilayah tersebut juga akan semakin meningkatkan NJOP-nya,

2. Keempat faktor yang diteliti pengaruhnya terhadap penerimaan PBB di wilayah Kabupaten Gunungkidul, semuanya adalah rendah, namun demikian terbukti keempat faktor tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan. Wilayah ini merupakan wilayah paling terbelakang di D.I. Yogyakarta, oleh sebab itu perlu penanganan yang lebih *integrated* untuk mengembangkan wilayah ini.

Secara umum implementasi strategis dari faktor-faktor yang diteliti dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah surat penagihan mencerminkan kapasitas administrasi, pada KP-PBB perlu ditingkatkan. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, kapasitas adminitrasinya sudah semakin baik dengan diterapkannya sistem SISTEP dan Kolektor, walaupun belum sepenuhnya berjalan efektif. Oleh sebab itu pihak KP-PBB perlu melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam lebih menggali potensi pajak, serta terus menerus mengadakan penyuluhan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

Secara internal KP-PBB perlu melaksanakan program intensifikasi, yaitu mengintensifkan pelaksanaan penagihan dari aparat pajak yang sudah ada. Termasuk dalam hal ini adalah meningkatnya mutu pelayanan pajak, terutama *cross check* antar inspeksi pajak. Selain program intensifikasi, pihak KP-PBB perlu meningkatkan program ekstensifikasi dalam lebih menggali potensi pajak, yaitu dengan

mengadakan *cross checking* dengan dinas-dinas terkait, sehingga dapat diketahui perkembangan NJOP di wilayahnya maupun untuk menggali WP-WP yang baru.

Pembayaran pajak oleh wajib pajak adalah dengan metode *self assignment* oleh sebab itu untuk dapat meningkatkan kesadaran WP, dapat dilaksanakan pada dua sisi sekaligus, yaitu sisi internal dan eksternal. Pada sisi internal, pihak KP-PBB perlu meningkatkan mutu pelayanan pajak, sehingga tingkat kepatuhan dari WP akan semakin meningkat. Pada sisi eksternal dapat dilakukan dengan mengaktifkan petugas pajak dalam memberikan penyuluhan pajak serta menegakkan *law enforcement* terhadap pelanggaran UU Perpajakan.

Pemerintah mungkin perlu merevisi UU No. 12 tahun 1994 pasal 2 mengingat terdapat perubahan-perubahan perikehidupan di masyarakat selaras dengan perkembangan jaman. Terutama berkenaan dengan pasal 3 objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang disebutkan diantaranya adalah Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Pada yayasan / koperasi dan pramuka saat ini sudah tidak semata-mata demi kepentingan umum tetapi juga dalam rangka memperoleh keuntungan sehingga kepemilikan tanah dan bangunan perlu di kenakan PBB. Demikian pula di bidang kesehatan dan pendidikan.

Adapun berkenaan dengan dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita, perlu kerjasama secara terpadu dengan pemerintah daerah setempat. Dana

prasarana pembangunan perlu dilaksanakan secara efektif untuk benar-benar dapat meningkatkan nilai bumi dan bangunan di wilayah yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat meningkatkan NJOP-nya. Dalam hal PDRB per kapita penduduk, pihak pemerintah daerah setempat perlu meningkatkan iklim yang kondusif bagi investasi dan pergerakan ekonominya, sehingga dapat meningkatkan PDRB.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana dan pendapatan per Kapita secara keseluruhan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi D.I. Yogyakarta. Jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana pembangunan prasarana, dan PDRB per kapita terutama berpengaruh paling besar di Kodia Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul, keempat faktor yang diteliti mempunyai pengaruh yang paling rendah dibandingkan dengan Daerah Tingkat II lainnya di D.I. Yogyakarta.
2. Jumlah surat penagihan merupakan pencerminan dari kapasitas administrasi mempengaruhi kemampuan pemungutan pajak, dan administrasi yang efisien dengan orang-orang yang integritasnya tinggi merupakan syarat terpenting untuk mencapai penghasilan maksimum, dan menggali potensi perpajakan suatu negara. Namun demikian surat penagihan tidak selalu efektif untuk menagih tunggakan pajak dari WP, selain karena adanya keberatan dari WP atas besarnya PBB, juga dapat disebabkan oleh ketidaksadaran WP dalam membayar PBB.

3. Kenaikan penerimaan pajak PBB disebabkan jumlah wajib pajak mengalami kenaikan, karena pembayar PBB akan semakin meningkat pula. Pemungutan PBB tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari pihak masyarakat, baik jumlah dan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kenaikan jumlah wajib pajak yang tidak diikuti dengan kenaikan penerimaan PBB, selain rendahnya tingkat kesadaran/ kepatuhan membayar pajak juga dapat disebabkan subyek PBB belum tentu merupakan WP PBB.
4. Dana pengembangan prasarana menunjukkan perkembangan pembangunan yang di wilayah setempat akan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak, atau yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai objek pajak, pada akhirnya menjadi objek pajak PBB. Kenaikan dana pembangunan prasarana juga tidak semata-mata langsung meningkatkan penerimaan PBB, karena apabila petugas PBB tidak selalu memantau perkembangan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi dan/ atau bangunan yang ada maka walaupun di lapangan NJOP-nya sudah naik, tetapi belum terpantau oleh KP-PBB setempat maka penerimaannya masih tetap seperti pada tahun sebelumnya.
5. Pendapatan masyarakat (tercermin dalam PDRB) menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk untuk membayar pajak. Pihak pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta perlu memikirkan untuk meningkatkan PDRB-nya sehingga PDRB per kapitanya juga dapat semakin meningkat.

6.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah di D.I. Yogyakarta, terutama KP-PBB perlu mengoptimalkan jumlah surat penagihan. Khususnya KP-PBB perlu melakukan program intensifikasi dalam lebih menggali potensi pajak, serta terus menerus mengadakan penyuluhan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. KP-PBB perlu melaksanakan program intensifikasi, yaitu mengintensifkan pelaksanaan penagihan dari aparat pajak yang sudah ada. Termasuk dalam hal ini adalah meningkat mutu pelayanan pajak, terutama *cross check* antar inspeksi pajak.
2. Untuk meningkatkan jumlah dan kesadaran wajib pajak, selain meningkatkan mutu pelayanan pajak, pihak KP-PBB perlu mengaktifkan petugas pajak dalam memberikan penyuluhan pajak serta menegakan *law enforcement* terhadap pelanggaran UU Perpajakan. Pihak KP-PBB perlu meningkatkan program ekstensifikasi dalam lebih menggali potensi pajak, yaitu dengan mengadakan *cross checking* dengan dinas-dinas terkait, sehingga dapat diketahui perkembangan NJOP di wilayahnya maupun untuk menggali WP-WP yang baru.
3. Pemerintah perlu mengkaji ulang UU No. 12 tahun 1985 pasal 2 mengingat terdapat perubahan-perubahan perikehidupan di masyarakat selaras dengan perkembangan jaman. Terutama berkenaan dengan pasal 3 obyek pajak yang

tidak dikenakan PBB adalah obyek pajak yang disebutkan diantaranya adalah Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Pada yayasan / koperasi dan pramuka, demikian pula di bidang kesehatan dan pendidikan, saat ini sudah tidak semata-mata demi kepentingan umum tetapi juga dalam rangka memperoleh keuntungan sehingga kepemilikan tanah dan bangunan perlu dikenakan PBB. Batas Tidak Terkena Pajak (BTKP) berdasarkan undang-undang tersebut yang sebesar Rp 8.000.000,- perlu dikaji ulang kelayakannya, kemungkinan dapat diturunkan antara Rp 5 juta,- hingga Rp 7 juta,-.

4. Dana prasarana pembangunan perlu dilaksanakan secara efektif dan terpadu untuk benar-benar dapat meningkatkan nilai bumi dan bangunan di wilayah yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat meningkatkan NJOP-nya. Dalam hal pendapatan per Kapita penduduk, pihak Pemerintah Daerah Propinsi D.I. Yogyakarta perlu meningkatkan iklim yang kondusif bagi investasi dan pergerakan ekonominya, sehingga dapat meningkatkan PDRB.

DAFTAR PUSTAKA

- Davey, Kenneth. 1995. **Principles of Macro Economic**, 4th edition, South Western Publishing Co.
- Devas, Nick. 1997. **The Macro Economy Today, Edition 5.** Schiller Random House Business Division.
- Ghofir, Abdul, 2000. "Optimalisasi PBB dalam Penerapan Otonomi Daerah". **Jurnal Pajak**, No. 1411/ Tahun XXXII, 15 Januari 2000.
- Gujarati, Damodar. 1992. **Basic Econometrics**. Alih Bahasa : Sumarno Zain. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Guritno Mangkoesobroto, 1993. **Ekonomi Publik**, Yogyakarta : BPFE - UGM.
- Handayani, Tri, 1999. **Analisis Penerimaan PBB di Kodia Dati II Yogyakarta**, Yogyakarta: Lembaga Penelitian FE-UGM.
- Insukrindo, 1994. **Penerimaan Pajak**. Bandung. Djambatan .
- Listyanto, B. Eko Budi, 1999. **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB di Semarang**, Yogyakarta: Lembaga Penelitian FE-UGM.
- Mardiasno, 1992. **Perpajakan**. Yogyakarta : Andi.
- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave, 1993. **Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek**. Penerjemah : Alfanius Sirait, dkk. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nazir, Moh, 1990, **Metode Penelitian**, Jakarta : Ghalilea Indonesia.
- Prasetyo Aji, 2000. "Nilai Jual Kena Pajak Progresif Mengacu Pada Nilai Bangunan Per M²", **Jurnal Pajak**, No. 1417/ Tahun XXXII, 15 April 2000.
- Purnomo Dwi, "Ekstensifikasi Wajib Pajak, Kenapa Tidak ?", **Jurnal Pajak**, No. 1401/Tahun XXXII, 15 agustus 1999)

- Soemitro, Rachmat. 1989. **Asas dan Dasar Perpajakan I**. Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Suparmoko, M, 1995. **Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek**. Yogyakarta : BPFE – UGM.
- Supranto, J, 1993. **Statistik Teori dan Aplikasi**. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Tim Peneliti Direktorat PBB dengan Fakultas Ekonomi Undip, 1997. **Studi Strategi Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan di Jawa Tengah**. Semarang: FE – Undip.
- Todaro, MP, 1994. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**. Penerjemah : Burhanudin Abdullah dan Harris Munandar. Jakarta : Penerbit. Erlangga.
- Winangun, IGN Mayun, 2000. “Reformasi Perpajakan dan Pokok-Pokok Pikiran UU KUP”, **Jurnal Pajak**, No. 1419/ Tahun XXXII, 15 Mei 2000.
- Zandjani, Tubagus Chairul Amachi. 1992. **Perpajakan**. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.